**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN
PONTAP KECAMATAN WARA TIMUR
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*

Diajukan oleh

**ARKAS MAULANA ASRI
2104010056**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN
PONTAP KECAMATAN WARA TIMUR
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*

Diajukan oleh

ARKAS MAULANA ASRI
2104010056

Pembimbing:

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arkas Maulana Asri
Nim : 2104010056
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 03 Mei 2025
Yang membuat pernyataan

Arkas Maulana Asri
NIM 2104010056

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo yang ditulis oleh Arkas Maulana Asri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104010056, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan 9 Dzulqaidah 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 7 Mei 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.	Ketua Sidang	( )
2. Ilham, S.Ag., M.A.	Sekretaris Sidang	( )
3. Hamida, S. E. Sy., M. E. Sy.	Penguji I	( )
4. Muhammad Ikram, S., S. Ak., M. Si.	Penguji II	( )
5. Dr. Muhammad Alwi, S. Sy., M. E. I.	Pembimbing	( )

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Hj Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 198007152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya diberikan kepada penulis, serta dengan giat penulis berusaha sehingga skripsi dengan judul “Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo”, dapat terselesaikan dengan tepat waktu walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad saw., Sang revolusioner yang tidak ada duanya, yang senantiasa dijadikan suritauladan dalam kehidupan dan seluruh umat Islam di segala dimensi kehidupan.

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini takkan mampu terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Asri Mude dan Ibu Nurhaedah. DM yang telah melahirkan saya yang merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang dari sekolah dasar hingga di perguruan tinggi.

Penulis juga dengan tulus dan rendah hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Palopo Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan IAIN Palopo Dr. Masruddin, M.Hum., serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Palopo Dr. Takdir, S. H., MH.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik Ilham, S, Ag., M.A. Wakil Dekan Bidang AMD. Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Alia Lestari, S,Si., M. Si. serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Dr. Muhammad Alwi S,Sy., M.E. dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Pembimbing Bapak Dr. Muhammad Alwi S, Sy., M.E. yang telah membimbing, memberi masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji Pertama Ibu Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku Penguji Pertama dan Bapak Muhammad Ikram, S., S. Ak., M. Si. selaku penguji Kedua yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Zainuddin, S., S.E., M. Ak, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Muhammad Amran, Mutiara Arlinda, Rusnawati, Pasha Orlanda, Nurhalisah, Nurhalisa, dan Siti Rahmadahni, yang sudah menjadi sahabat yang selama ini telah bersama-sama berjuang mulai dari maba sampai saat ini, yang selalu memberi semangat, motivasi, juga menemani peneliti dalam menyusun skripsi memberikan saran dan arahan. Terimah kasih atas segala kebaikan kalian Semoga Allah SWT memberikan kalian kesehatan dan membalas semua kebaikan kalian Aamiin.
9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Kelas B Angkatan 2021 yang selama ini telah bersama-sama berjuang dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.
10. Teruntuk rekan kerja saya di Warren Store yang selalu mengsupport dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini semoga kita selalu diberikan kesehatan.

Akhirnya, penulis berharap agar Skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun diharapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya

Palopo 03 Mei 2025

Arkas Maulana Asri
NIM 2104010056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa*

هَوَّلَ *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عُدُّوا : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
سَيِّئٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata —Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

dīnullāh *billāh*
دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ

Adapun *tā''marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahrū

Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr

Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= shubahanahu wa ta'ala
saw.	= shallallahu _alaihi wa sallam
a.s	= _alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= Warahmatullaahi
Wb.	= Wabarakaatuh
l.	= Lahir tahun (untuk yang masih hidup saja)
w.	= Wafat sebelum
QS.../...:4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali _Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori	14
C. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Fokus Penelitian	44
D. Desain Penelitian	44
E. Sumber Data	45
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Teknik Pengumpulan Data	46

H. Teknik Pengolaan dan Analisis Data.....	47
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Data	52
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S At-Taubah/9 : 105	31
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah/2 : 177	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2024.....	2
Tabel 1.2 Penerima PKH Kecamatan Wara Timur	5
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per RT/RW di Kelurahan Pontab	53
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan yang dianut.....	54
Tabel 4.3 Jumlah sarana kantor lurah	55
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Gedung Kesehatan.....	55
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan	55
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Rumah Ibadahq.....	56
Tabel 4.7 Jumlah sarana Kebersihan.....	56
Tabel 4.8 Data Informan Pendamping PKH	56
Tabel 4.9 Rincian Data yang Diberikan Informan.....	57
Tabel 4.10 Distribusi data informan berdasarkan usia.....	57
Tabel 4.11Distribusi data informan berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel 4.12 Distribusi data informan berdasarkan pekerjaan.....	58
Tabel 4.13 Distribusi data informan berdasarkan Tingkat penghasilan.....	59
Tabel 4.14 Distribusi data informan berdasarkan jumlah anggota keluarga.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

ABSTRAK

Arkas Maulana Asri, 2025 . *“Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. dibimbing oleh Muhammad Alwi.

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu:1) Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.2) Bagaimana Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pendamping dan penerima PKH. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan penelitian-penelitian itu sendiri (human instrument). Analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Implementasi pada pelaksanaan PKH di kelurahan pontap berjalan baik dan dilakukan sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada.2)Peningkatan kesejahteraan di Kelurahan Pontap melalui bantuan PKH dapat dikatakan berjalan cukup optimal dikarenakan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Kata Kunci: Efektivitas, Kemiskinan, Kesejahteraan.

ABSTRACT

Arkas Maulana Asri, 2025, The Effectiveness of the Family Hope Program Policy in Improving the Welfare of the Poor in Pontap Village, East Wara District, Palopo City” Thesis of Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Institut Agama Islam Negeri Palopo. supervised by Muhammad Alwi.

This research discusses the Effectiveness of the Family Hope Program Policy in Improving the Welfare of the Poor in Pontap Village, East Wara District, Palopo City. This research raises problems, namely: 1) How is the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in East Wara District, Palopo City.2) This type of research is qualitative descriptive and there are two data collection techniques in this research, namely library research and field research by means of observation, interviews, and documentation. There are two data sources in this research, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained from PKH facilitators and recipients, while secondary data was obtained from books, journals, and the studies themselves (human instrument). Data analysis in this study used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Family Hope Program is effective in improving the welfare of the poor in Pontap Village, East Wara Subdistrict, Palopo City.

Keywords: Effectiveness, Poverty, Prosperity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah berkewajiban memperhatikan masalah kemiskinan karena itu merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah kemiskinan saat ini menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Diantara faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan adalah tingginya angka kemiskinan.¹ Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah rencana pengentasan kemiskinan sejak kemerdekaan, mulai dari rencana peningkatan kesejahteraan pasca kemerdekaan hingga rencana pengentasan khusus kemiskinan.

Menurut ekonomi klasik Adam Smith pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.² Menurut saya Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan

¹Siti Rizayani et al., "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kota Banjarbaru," *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 1 (2022): 74–82, <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5209>.

²Dewi Kurniawati Sunusi, Anderson Kumenaung, and Debby Rotinsulu, "Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan

kapasitas suatu negara atau wilayah dalam memproduksi barang dan jasa, yang diukur dari kenaikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemajuan ekonomi yang dicapai suatu negara, yang biasanya ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Kota Palopo adalah 14,85 ribu jiwa dengan persentase 7,69% .Dibandingkan secara regional dengan wilayah Luwu Raya, Kota Palopo memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit. Selain itu, Kota Palopo merupakan kota dengan penduduk miskin kedelapan terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan.³ Berikut adalah data jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2024

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin
1.	Kepulauan Selayar	12,27
2.	Bulukumba	7,22
3.	Bantaeng	9,18
4.	Jeneponto	13,06
5.	Takalar	8,29
6.	Gowa	7,42
7.	Sinjai	8,55
8.	Maros	9,65

Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 14, no. 2 (2014): 120–37, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4732>.

³Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey.

9.	Pangkajene Dan Kepulauan	13,40
10.	Barru	8,46
11.	Bone	10,53
12.	Soppeng	7,48
13.	Wajo	6,73
14.	Sidenreng Rappang	5,14
15.	Pinrang	8,90
16.	Enrekang	12,69
17.	Luwu	12,71
18.	Tana Toraja	12,48
19.	Luwu Utara	12,66
20.	Luwu Timur	6,93
21.	Toraja Utara	12,12
22.	Kota Makassar	5,07
23.	Kota Parepare	5,34
24.	Kota Palopo	7,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Dalam Angka 2024

Masih tingginya angka kemiskinan dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat masih kurang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dari segi ekonomi, kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi faktor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

Roqi dalam penelitiannya mengatakan bahwa Implementasi PKH sesuai dengan Pedum PKH tahun 2020 dan PKH juga memberikan dampak positif pada

kondisi masyarakat sekarang yaitu mewujudkan kemajuan dalam masyarakat terutama kemajuan kesehatan, pendidikan.⁴Fenomena ini menggambarkan bahwa pengimplementasian terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun pada faktanya masih ditemukan kendala dan hambatan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alfi yang mengemukakan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan dapat dikategorikan sangat efektif.⁵Walaupun demikian terkait dengan program PKH masih terdapat kendala dan hal tersebut yang akan dikaji oleh peneliti baik dari segi kebijakan dan pengimplementasiannya dimasyarakat.

Dari fakta literatur dalam penelitian yang dilakukan oleh Masrul Ikhsan yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya” disini peneliti menjelaskan bahwa implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya itu sudah berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat contohnya saja, meningkatnya kondisi social-ekonomi dan bidang pendidikan. Komponen-komponen tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka, selain itu dengan peningkatan di

⁴Roqi Yasin and Muhammad Rizqie Aris, “Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 11 (2023): 1112–21, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i11.1853>.

⁵Alfi Syahdillah and Eddy Suriyani, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Bidang Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong,” *Japb* 6, no. 1 (2023): 92–102, <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/740/596>.

bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bidang lainnya bisa menjadi faktor untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Wara Timur memiliki penduduk yang beragam mulai dari agama, ras, suku dan budaya. Luas wilayah adalah 12,08 kilometer persegi, dan total penduduknya adalah 36.840 jiwa. Kecamatan Wara Timur memiliki 7 Kelurahan diantaranya Kelurahan Surutanga, Kelurahan Benteng, Kelurahan Pontap, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Ponjalae. Di Kecamatan Wara Timur Kelurahan Pontap menjadi Kelurahan yang memiliki jumlah penerima PKH paling banyak. Berikut adalah data jumlah penerima PKH di Kecamatan Wara Timur.

Tabel 1.2 Penerima PKH Kecamatan Wara Timur 2024

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah KPM
1.	Surutanga	145
2.	Benteng	104
3.	Pontap	330
4.	Malatunrung	43
5.	Salekoe	45
6.	Salotellue	113
7.	Ponjalae	168

Sumber : Pendamping PKH Kelurahan Pontap 2024

Berdasarkan data tersebut menjadi alasan dan landasan peneliti untuk mengambil lokasi penelitian pada Kelurahan Pontap karena jumlah penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Wara Timur. Di Kelurahan Pontap

jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 330 orang yang dimana klasifikasi tersebut untuk penerima yang sudah meninggal sebanyak 5 orang, dan yang pindah sebanyak 4 orang, serta yang mampu atau sudah tidak layak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 6 orang. Dari data tersebut, dengan demikian adanya Program keluarga Harapan (PKH) mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur.

Hal tersebut di dukung dengan fakta lapangan yang dilakukan oleh peneliti melalui pendamping PKH Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur, dengan hasil, bahwa pengimplementasian PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur terbukti dengan sudah ada beberapa kpm yg bersedia mundur dari PKH Krn mereka merasa sudah tidak layak lagi menerima bantuan PKH. Dan terkait dengan kebijakan PKH yang disalurkan melalui bantuan sembako dirasa peneliti kurang efektif melalui fakta lapangan di dapatkan hasil karena bantuan dalam bentuk sembako kurang efektif sebab jumlah barang yg di berikan ke masyarakat terbatas dan rawan untuk dikorupsi. Dan bila dalam bentuk uang masyarakat bebas membelanjakan kebutuhan pokok yg mereka inginkan dengan kualitas yg mereka inginkan pula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo?

2. Bagaimana Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pengembangan pengetahuan dan peningkatan pengetahuan terkait kebijakan Program Keluarga Harapan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dengan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), dan dapat membantu Dosen, Mahasiswa/mahasiswi, dan civitas akademika lainnya dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Nikita Vidiana Senduk yang berjudul “Dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado”

Tujuan penelitian ini adalah dilakukan untuk mengetahui dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dengan rumusan masalah bagaimana Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado, Program Keluarga Harapan memberikan dampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH karena membantu keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Akan tetapi masih ada beberapa masalah yang di temui di tempat penelitian yakni penyaluran bantuan beras yang tidak tersalurkan dengan baik, dan dana bantuan yang tidak tersalurkan dengan baik.⁶ Persamaan Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menjadikan focus penelitian pada pengimplementasian Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan

⁶ Nikita Vidiana Senduk, Burhanuddin Kiyai, and Novva N. Plangiten, “Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado,” *Jap* 7, no. 101 (2021): 40–47, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33294/31487>.

kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya pada penelitian ini mengkaji terkait variable kebijakan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada penelitian sebelumnya mengkaji variabel dampak Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Domri yang berjudul “ Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin.

Sedangkan hambatannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, kendala teknis dalam proses pendataan penerima program PKH, kendala teknis dalam pendampingan program PKH, serta kendala teknis dalam penyaluran/pendistribusian dan penggunaan dana program PKH. Adapun upaya Pemerintah Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat dalam mengatasi hambatan pada program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya;

meningkatkan sosialisasi, pemutakhiran data penerima PKH, kepastian jadwal pembayaran, penangguhan atau pembatalan peserta.⁷

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menjadikan focus penelitian pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya pada penelitian ini lebih spesifik membahas terkait dengan efektivitas kebijakan Program Keluarga Harapan dan dampaknya kepada masyarakat dalam kesejahteraan, sedangkan pada penelitian sebelumnya spesifik membahas kendala dan upaya Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Refalgi Akbaryang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus di Kelurahan Delapan Lir Kota Palembang)”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh manapelaksanaan program Keluarga Harapan di Kelurahan 8 Ilir Kota Palembang. Jenis penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni salah satu prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari seseorang serta perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Delapan Ilir belum sepenuhnya

⁷Baiq Dewi Kamariani et al., “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Journal of Administrative and Social Science* 5, no. 1 (2024): 205–19, <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>.

terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini dilihat dari indikator (1) Komunikasi (*Communication*) (2) Sumber Daya (*Resources*) (3) Disposisi dan (4) Struktur birokrasi. Faktor Penghambat nya ialah, dimana dapat terjadi disetiap tahap Implementasi pemahaman masyarakat yang masih kurang, jarak tempuh lokasi pendamping jauh sehingga kurang maksimal dan adanya kecemburuan sosial di masyarakat.⁸ Persamaan Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji kebijakan Program Keluarga Harapan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Kebijakan Harapan. Perbedaannya pada penelitian ini berfokus membahas efektivitas dari kebijakan Program Keluarga Harapan, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengimplementasian dari Program Keluarga Harapan.

4. Masrul Ikhsan yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya. Metode dalam penelitian ini merupakan Penelitian Kebijakan (*Policy Research*) dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya sudah berhasil.

⁸Syamsudin Refalgi Albar, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kelurahan Delapan Ilir Kota Palembang),” *Jurnal EnersiaPublika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik* 8, no. 1 (2024): 64, https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/1902.

Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kondisi sosial-ekonomi RTSM, KPM PKH mengakui bahwa anak-anak mereka kini dapat bersekolah setidaknya hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Kemudian faktor pendukung dalam implementasi PKH juga mendapatkan dukungan dari para stakeholder. Namun dalam pelaksanaan PKH, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu adanya rasa kecemburuan dari masyarakat yang bukan penerima PKH dan menginginkan peserta PKH yang dianggap graduasi dihentikan dari bantuan PKH dan digantikan dengan peserta PKH baru.⁹ Persamaan Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji pada variable kebijakan Program Keluarga Harapan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Kebijakan Harapan. Perbedaannya pada penelitian ini berfokus membahas efektivitas dari kebijakan Program Keluarga Harapan dalam lingkup Kelurahan, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengimplementasian dari Program Keluarga Harapan pada lingkup Kecamatan.

5. Fitri Aningsih Elia yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Nawarpi Distrik Wania Kabupaten Mimika”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang digunakan

⁹ Ahmad Hadi Masrul Ikhsan, Hafzana Bedasari, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya,” *Jurnal Administrasi Publik Dan Sosial* 3, no. 3 (2022): 171–75, <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/view/89>.

adalah metode deskriptif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik daftar wawancara, buku catatan, dan kamera.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dinas sosial melakukan sosialisasi sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan; (2) Dinas sosial melakukan sosialisasi sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan; (3) Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan masyarakat yang mampu dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; (4) Dana PKH yang digunakan oleh penerima PKH tidak digunakan untuk meningkatkan perekonomian.¹⁰ Persamaan Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menjadikan focus penelitian pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya pada penelitian ini lebih spesifik membahas terkait dengan efektivitas kebijakan Program Keluarga Harapan, sedangkan pada penelitian sebelumnya spesifik membahas kendala dan upaya Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Teori Kapabilitas

Amartya Sen membuat teori kapabilitas yang berfokus pada kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam konteks ketidacukupan konsumsi pangan, teori ini menekankan bahwa kelaparan bukan

¹⁰Fitri Aningsih Elia, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika," *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)* 5, no. 1 (2021): 15–42, <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/152>.

hanya karena produksi pangan yang tidak mencukupi, tetapi lebih pada akses yang tidak merata terhadap sumber daya yang memungkinkan orang makan. Teori ini menunjukkan, bahwa dalam kasus ketidakcukupan pangan, kelaparan dan ketidakcukupan pangan bukan hanya akibat dari kurangnya ketersediaan pangan, tetapi juga akibat dari kegagalan akses terhadap makanan. Teori kapabilitas membantu menjelaskan bahwa ketidakcukupan konsumsi pangan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang atau kelompok masyarakat untuk memanfaatkan peluang yang tersedia bagi mereka untuk mendapatkan sumber pangan.¹¹

Dengan pendekatan kapabilitas, orang miskin tidak lagi dipahami sebagai orang yang berpendapatan rendah. Sen lebih memahami orang miskin sebagai orang yang kehilangan kapabilitas (*deprivasi kapabilitas*). Seberapa besar kapabilitas yang dimiliki akan menjadi ukuran apakah orang tersebut miskin atau tidak. Seseorang bisa saja memiliki pendapatan yang tinggi, namun jika pada saat yang sama ia menderita penyakit yang membutuhkan biaya besar, maka kondisi ini akan membuat tingkat kapabilitasnya menjadi rendah. Menurut Sen, kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu dapat diklasifikasi menjadi kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*). Dengan klasifikasi ini, Sen ingin menunjukkan kesejahteraan bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan seseorang ketika menentukan tindakan yang akan diambil. Seseorang bisa saja memilih tindakan yang tidak terkait dengan motif maksimalisasi kesejahteraan. Oleh karena itu, secara garis besar, ada dua pertimbangan yang dianggap bernilai oleh setiap orang. Yang pertama,

¹¹M.H. Dr. H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.Si. Dr. Safrizal ZA, and M.Hum. Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., *Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia* (Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Aceh, 2024), 648.

pertimbangan kesejahteraan (*well-being*) berupa motif umum yang dijadikan pertimbangan oleh seseorang dalam bertindak. Dan yang kedua adalah pertimbangan kepelakuan (*agency*).¹²

Pendekatan Sen menjadi sangat penting dalam kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, di mana bukan hanya soal memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu dan komunitas untuk membangun kapasitas mereka. Kebijakan publik berdasarkan teori ini akan lebih memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja sebagai elemen kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teori ini menawarkan kerangka baru untuk mengevaluasi keadilan sosial, tidak hanya berdasarkan distribusi sumber daya, tetapi juga kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan sejahtera.¹³

2. Konsep Tentang Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sarana yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin dekat sasaran, berarti tinggi efektivitasnya.¹⁴ Menurut Gibson pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok,

¹²Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 314.

¹³Asep Sapsudin, *Filsafat Hukum Ketatanegaraan* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024), 200.

¹⁴ Syahdillah and Suriyani, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Bidang Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong," 92–102.

dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.¹⁵ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dengan demikian efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran atau tujuan.¹⁶

2. Konsep Tentang Kartu Keluarga Harapan (PKH)

a. Sejarah Kartu Keluarga Harapan (PKH)

Dasar penyelenggaraan program ini didasarkan pada serangkaian peraturan dan undang-undang yang mencakup beberapa aspek krusial dalam pembangunan sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan landasan bagi upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan dan miskin. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan merata. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

¹⁵ Ummul Hanifah Putri, "Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan," 2021, 2, <https://osf.io/preprints/inarxiv/yg3an/>.

¹⁶ Muhammad Irwan Padli Nasution, "Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis Mobile Learning Pada Sekolah Dasar," *Jurnal Iqra'* 10, no. 1 (2021): 5, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56683079/2376301PBIqra1libre.pdf?1527602526=&responsecontentdisposition=inline%3B+filename%3DSTRATEGI_PEMBELAJARAN_EFEKTIF_BERBASIS_M.pdf&Expires=1724581249&Signature=LcvV7vHgpi9XXJNfxXmHYza8VjmS5j~jIJuroSyn5co7p8kxKR.

menegaskan pentingnya aspek berkeadilan dalam pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memberikan pijakan untuk pendekatan yang lebih terstruktur dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia.¹⁷

Proses pemanfaatan bantuan yang dilakukan penerima PKH ialah penggunaan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang KPM terima untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima. Pemanfaatan bantuan sosial PKH oleh penerima sangat diperlukan agar sesuai dengan tujuan PKH, dikarenakan bantuan PKH merupakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk layanan pendidikan dan kesehatan.¹⁸

b. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin yang memenuhi salah satu kriteria yang terdiri dari anak usia 0 sampai 21 tahun, ibu hamil/nifas, lansia di atas 70 tahun dan disabilitas berat. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Tujuan

¹⁷Nurinda; Ramli Mahmud; Sastro M. Wantu Ibrahim, "Pelaksanaan PKH Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 1–23.

¹⁸Amelia Putri and Eka Vidya Putra, "Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah," *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2024): 131–40, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.880>.

Program Keluarga Harapan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin seperti meningkatkan kondisi sosial ekonomi, meningkatkan taraf pendidikan anak dan meningkatkan status kesehatan.¹⁹

Keluarga Harapan (PKH) membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.²⁰

Beberapa program yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin di Indonesia diantaranya program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program

¹⁹ Firdaus Mirza Nusuary Ipah Nazira, Masrizal, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Ilmial Mahasiswa* 7, no. 4 (2022): 16, <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22344/10461>.

²⁰ Cindie Gita D. Tamuntuan, Stefanus Sampe, and Fanley N. Pangenaman, "Transparansi Pendataan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon," *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47384/42154>.

Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang paling populer di masyarakat. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan, program ini sangat membantu kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan.²¹

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin agar dapat meningkatkan kualitas hidup, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu program unggulan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program jaminan perlindungan sosial yang telah lama berjalan dan mendapat perhatian dari pemerintah khususnya Kementerian Sosial RI. Melalui PKH upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melalui kementerian sosial berkomitmen memberikan bantuan sosial bersyarat sebagai stimulus kepada masyarakat kurang mampu dan rentan yang sudah terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin.²² Meskipun program ini bertujuan mulia, ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa permasalahan pada PKH:

²¹ Muhammad Alwi and Marwati Sulni, "Program Keluarga Harapan Dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11 (2022): 307–19, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2458>.

²² Fasiha Fakultas, Ekonomi Dan Bisnis, and Muhammad Alwi, "Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan the Urgence of Financial Management of Households Beneficiaries of the Hope Family Program in Increasing Welfare" 9, no. 01 (2023).

1) Kurangnya Edukasi Dan Sosialisasi

Ketidaksesuaian data penerima manfaat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dana bantuan, dan tantangan operasional para pendamping sosial. Selain itu, pencairan dana di lokasi yang sulit dijangkau juga menjadi salah satu hambatan.²³

2) Permasalahan Komunikasi

Komunikasi antara Pendamping dan Penerima Permasalahan komunikasi sering muncul antara pendamping dan penerima manfaat, yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban penerima PKH, seperti pemeriksaan kesehatan dan kehadiran anak di sekolah. Komunikasi yang tidak efektif dapat memengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan.²⁴

3) Dampak Sosial dan Konflik

Konflik sosial sering muncul akibat distribusi bantuan yang tidak merata. Pendamping sosial memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik ini, tetapi mereka juga menghadapi keterbatasan, seperti kurangnya dukungan logistik dan dana operasional.²⁵

4) Efektivitas dan Evaluasi Program

Ada studi yang menyoroti efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan penerima, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan seperti

²³Fitri Kamilah, Saeful Anwar, and Ratna Dewi, "Pengaruh Adanya Program Keluarga Harapan Bagi Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Program," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 4 (2023): 459–78, <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i4.24294>.

²⁴Abd Rohman, Retno Ayu, and Dewi Novitawati, "Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 8, no. 2 (2020): 22.

²⁵Riska Nandini et al., "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 74, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>.

ketidakcocokan data dan penggunaan dana bantuan untuk kebutuhan di luar prioritas yang ditetapkan.²⁶

c. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pencairan dana PKH di tahun 2024 akan terus berlanjut, dibagikan secara bertahap dalam 4 tahap.

2. Pencairan PKH bulan November 2024 merupakan pencairan tahap keempat dan terakhir di tahun 2024.

3. Dana PKH diharapkan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan anak dan kesehatan ibu hamil serta balita.²⁷

4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH wajib hadir saat pertemuan, menarik bantuan PKH, dan membawa kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan buku tabungan.

5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tidak boleh memberikan kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan buku tabungan ke orang lain agar tidak disalahgunakan.²⁸

²⁶Sulfadli Sulfadli et al., "Evaluasi Dampak Program: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Enrekang," *Development Policy and Management Review (DPMR)* 3, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.61731/dpmr.v3i1.26674>.

²⁷ Maksum Rangguti, "Daftar Kriteria Penerima Terbaru Program PKH 2024", Oktober 29, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/daftar-kriteria-penerima-terbaru-program-pkh-2024/#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20pencairan%20dana,kesehatan%20ibu%20hamil%20serta%20balita.>

²⁸ Kerobokankaja, "Pertemuan Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)", Mei 16, 2024, <https://kerobokankaja.badungkab.go.id/berita/56869-pertemuan-kelompok-keluarga-penerima-manfaat-kpm-program-keluarga-harapan-pkh-#:~:text=Adapun%20kewajiban%20sebagai%20KPM%20PKH,lain%20agar%20tidak%20disalahgunakan%20bantuannya.>

6. Kebijakan terbaru Program Keluarga Harapan (PKH) 2024 dari pemerintah Indonesia berfokus pada ketepatan sasaran dan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin yang berisiko tinggi.

7. Ada pula batasan baru terkait penerima bantuan per keluarga: misalnya, bantuan diberikan untuk maksimal tiga anak, dan untuk ibu hamil, bantuan hanya diperuntukkan hingga kehamilan kedua. Lansia yang menerima bantuan harus berusia minimal 60 tahun, sementara untuk keluarga dengan balita, bantuan terbatas untuk dua anak berusia 0-6 tahun.²⁹

d. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penutupan lokalisasi dengan penggantian kompensasi dan pelatihan ketrampilan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang selama ini menjadi cita-cita pemerintah untuk bebas prostitusi. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah menjelaskan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah dan terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.³⁰

²⁹ Aksara, "Aturan Baru Penyaluran Bansos PKH dan BPNT 2024: Berikut Rinciannya", September 24, 2024, <https://infosumbar.net/berita/berita-nasional/aturan-baru-penyialuran-bansos-pkh-dan-bpnt-2024-berikut-rinciannya/>

³⁰ Hanjar Makhmucik and Netty Endrwati, "Perlindungan Hukum Wanita Pekerja Seks (WPS) Pasca Penutupan Lokalisasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009," *Jurnal*

2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam penanganan masalah kemiskinan di Indonesia. Melalui UU ini, diharapkan ada penanganan yang lebih *sistematis*, terpadu, dan berkelanjutan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin.³¹

3) PMK No.228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No.254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

PMK No. 228/PMK.05/2016 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengubah beberapa ketentuan dari PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola dan mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial, sehingga dana bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Secara keseluruhan, PMK No. 228/PMK.05/2016 bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi belanja bantuan sosial pada Kementerian/Lembaga. Dengan aturan yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang diperkuat, diharapkan dana bantuan sosial dari APBN dapat disalurkan dengan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Ilmu Hukum 8, no. 1 (2020): 42–54, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/918>.

³¹ Putri Nurhasanah et al., “Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4589, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>.

4) Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH yang diperbaharui melalui Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah aturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan PKH, sebuah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Aturan ini kemudian diperbarui dengan Permensos No. 1 Tahun 2018, yang menambahkan beberapa ketentuan dan menyempurnakan implementasi program agar lebih tepat sasaran dan efektif. Melalui perubahan ini, Permensos No. 1 Tahun 2018 menyempurnakan tata kelola PKH, memperketat verifikasi data, meningkatkan monitoring, serta mengoptimalkan peran pendamping sosial. Dengan demikian, program PKH diharapkan lebih efektif dalam meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup keluarga miskin, serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.³²

5) Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai adalah regulasi yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial dari pemerintah dalam bentuk non-tunai. Tujuan dari Perpres ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial serta memastikan bahwa bantuan diterima

³²Daud Rismana, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh)," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 137, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2201>.

langsung oleh keluarga atau individu yang berhak tanpa perantara, sehingga risiko penyelewengan atau salah sasaran bisa diminimalkan. Secara keseluruhan, Perpres No. 63 Tahun 2017 menciptakan mekanisme bantuan sosial yang lebih efisien, modern, dan tepat sasaran. Dengan sistem non-tunai, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial.³³

6) SK Dirjen No.12/LJS.SET.OHH/09/2016 Tentang Pedoman Umum PKH.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (SK Dirjen) No. 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah aturan yang memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. SK ini bertujuan untuk menyelaraskan implementasi PKH di seluruh wilayah agar program bantuan sosial bersyarat ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, SK Dirjen No. 12/LJS.SET.OHH/09/2016 memberikan pedoman yang komprehensif bagi pelaksana PKH di seluruh Indonesia. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan PKH dapat dijalankan secara seragam, tepat sasaran, dan efisien di seluruh wilayah, sehingga benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

7) Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri).

Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) – yang terdiri dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat

³³ kementerian sosial, “Petunjuk Teknis Penyaluran Non-Tunai Program Keluarga Harapan,” no. 28 (2020): 1–6, <https://drive.google.com/file/d/1c95fppRDYRtfnQhMI9TuKbcRf-jQcQk6/view>.

Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri – merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah dengan bank-bank milik negara untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan layanan keuangan. Kerjasama ini diatur untuk mendukung penyaluran bantuan sosial non-tunai yang tepat sasaran, efisien, dan transparan. Secara keseluruhan, Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan secara efektif, transparan, dan aman melalui mekanisme perbankan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, serta memberikan dukungan kepada penerima bantuan dalam mengakses layanan keuangan yang lebih luas dan mendorong kesejahteraan ekonomi mereka.³⁴

d. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

- 1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat dengan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- 2) Menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Mengubah perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social.
- 4) Memotong kemiskinan dan kesenjangan.³⁵

³⁴Erytria Meylina and Banu Witono, “Analisis Perbandingan KINERJA Keuangan Antara Bank BRI, BNI, BTN DAN MANDIRI Pada Tahun 2012-2020,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 165–71.

³⁵Sukma Aprilia Puntorini and Eko Priyo Purnomo, “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Rangka Pengurangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Bantul Tahun 2018,” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2020): 230–42, <http://doi.org/10.21009/JKKP.072.10>.

5) Tujuan dari PKH di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat kurang mampu dengan memberikan fasilitas berupa layanan keuangan digital, pengentasan anak buta huruf, penyediaan rumah belajar dan mediasi anak untuk mendaftar ke pendidikan formal, nonformal dan pendidikan luar sekolah.

6) PKH yang menjadi harapan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam segi ekonomi.

7) Tujuan PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relative kurang peningkatan kesejahteraan di Desa Tenga.³⁶

e. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

- 1) Manfaat PKH yaitu meningkatkan taraf pendidikan.
- 2) Partisipasi sekolah semakin meningkat.
- 3) Meringankan beban.
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga penerima manfaat PKH.
- 5) Meningkatkan pola hidup sehat keluarga penerima PKH.
- 6) Mendapatkan layanan kesehatan gratis.
- 7) Meningkatkan kondisi ekonomi keluarga penerima PKH.
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merekatkan kekeluargaan.³⁷

³⁶Winda Aulya Wardani et al., "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 4 (2023): 2189–96, <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706>.

³⁷Martha Inka Timmerman, Sarah Sambiran, and Sofia E Pangemanan, "Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Penanganan Covid-19 Di

9) Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan.

10) Meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas.

11) Mampu mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.³⁸

3. Konsep Tentang Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan baik tinggal di kota maupun yang di desa, sejahtera lahir dan bathin. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.³⁹

Secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana segenap warga negara selalu berada dalam kondisi serba kecukupan segala kebutuhannya, baik material maupun spiritual.⁴⁰ Kesejahteraan berpotensi untuk memengaruhi aspek kehidupan rumah tangga lainnya seperti pendidikan,

Kelurahan Mahakeret Barat,” *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34570/32454>.

³⁸H. Moh. Juhad Juhad, “Analisis Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Selong Lombok Timur,” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 1, no. 2 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i2.106>.

³⁹Dahlia Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Quran and Hadits* 3, no. 1 (2020): 2, file:///C:/Users/USER/Downloads/15-Article Text-145-1-10-20201001.pdf.

⁴⁰Indria Wahyuni dan Sri Pingit Wulandari, “Pemetaan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Menggunakan Analisis Cluster Hierarki,” *Jurnal Sains Dan Seni* 11, no. 1 (2022): 1–6, <https://www.neliti.com/publications/488166/pemetaan-kabupatenkota-di-jawa-timur-berdasarkan-indikator-kesejahteraan-rakyat>.

kesehatan, dan keharmonisan dalam rumah tangga.⁴¹ Di Indonesia istilah kesejahteraan pada umumnya diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan material dan kebutuhan non material dimana manusia aman dan bahagia karena kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Kesejahteraan dalam Islam biasa juga disebut falah. Falah merupakan kondisi maksimum yang dirasakan seseorang dalam kebahagiaan di dunia apun diakhirat. Tercukupinya kebutuhan seseorang, akan memberikan dampak yang disebut masalah. Masalah adalah bentuk keadaan baik material maupun non , yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁴² Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat dimana telah terpenuhinyakebutuhan dasar berupa, terpenuhinya sandang, pangan, papan, kesehatan pendidikan, lapangan pekerjaan. Menurut Horton dan Hunt masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara *relative* mandiri, yang hidup secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.⁴³

Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah ialah tercukupinya segala macam kebutuhan baik kebutuhan material maupun spiritual

⁴¹ Amba Hamida et al., "Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being?," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 27, no. 1 (2023): 10–20, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>.

⁴² Syahidah Rahmah, "Etos Kerja Pedagang Muslim Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar," *Journal of Applied Managerial Accounting* 5, no. 2 (2021): 78–94, <https://doi.org/10.30871/jama.v5i2.3496>.

⁴³ Taufiq Arya Putra Nayotama and Ahmad Saifudin Mutaqi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik* 2, no. 1 (2023): 113–21, <https://doi.org/10.55606/jurritek.v2i1.916>.

yang dilandaskan ketaatan akan norma yang telah Allah SWT. gariskan yang dilaksanakan secara sadar oleh individu atau masyarakat atas dasar petunjukNya dalam Al- Qur'an, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang dilanjutkan dengan oleh para ulama dengan ijtihad kebaikan. Maka dari itu kesejahteraan masyarakat membutuhkan sebuah perjuangan dan kerelaan untuk berkorban secara berkelanjutan dari setiap individu, kelompok, maupun masyarakat.⁴⁴ Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*).⁴⁵ Hal ini tertuang dalam QS. At- Taubah/ 9:105 sebagai berikut.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.

⁴⁴Muhammad Alfi Syahrin, Mohammad Arifin, and Reza Hilmy Luayyin, “Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah,” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1, no. 2 (2022): 95–105, <https://doi.org/10.46773/v1i2.395>.

⁴⁵Didi Suardi, “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam,” *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 1–13, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/180>.

*Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.*⁴⁶

Tafsir:

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, agar beliau mengatakan kepada kaum Muslimin yang mau bertobat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat dan melakukan amal saleh sebanyak mungkin. Di samping itu, Allah juga memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya, bahwa apabila mereka telah melakukan amal-amal saleh tersebut maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Di sana Allah akan memberitahukan kepada setiap orang tentang hasil dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya selagi ia di dunia dengan cara memberikan balasan terhadap amal mereka. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan azab dan siksa.

b. Kategori Kesejahteraan

1) Kesejahteraan Sosial atau social welfare adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Kementerian Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya

⁴⁷ Nur Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 51, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

2) Kesejahteraan Jiwa atau psikologis adalah konsep yang berkaitan dengan perasaan yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari lalu perasaan tersebut diungkapkan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh individu tersebut sebagai hasil dari pengalaman hidupnya. Selain itu, kesejahteraan psikologis dapat dimaknai pula sebagai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang diperoleh serta hilangnya gejala-gejala depresi.⁴⁸

c. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan dalam masyarakat itu menurut pandangan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu:

- 1) Indikator Pendidikan
- 2) Indikator Ketenagakerjaan
- 3) Indikator Demografi
- 4) Indikator Sosial
- 5) Indikator Kesehatan⁴⁹

Kesejahteraan juga dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam.

⁴⁸ Aisya Farah Sayyidah et al., "Peran Religiusitas Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis," *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 13, no. 2 (2022): 103–15, <https://doi.org/10.15548/alqalb.v13i2.4274>.

⁴⁹ Nawarti Bustamam, Shinta Yulyanti, and Kantthi Septiana Dewi, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ekonomi KIAT* 32, no. 1 (2021): 85–92, [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(1\).7677](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(1).7677).

3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas, pendidikan, lingkungan budaya.

4) Dengan melihat kualitas hidup seperti moral, etika, keserasian penyesuaian.

Indikator kesejahteraan di atas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain.⁵⁰

4. Konsep Tentang Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan individu masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan rendahnya kualitas sumberdaya yang dimiliki, Upah minimum yang tidak sesuai biaya hidup, serta meningkatnya jumlah penduduk mempengaruhi daya saing dalam berbagai sektor kebutuhan, terutama untuk mendapatkan pekerjaan.⁵¹ kemiskinan adalah keadaan tidak mampu, secara finansial atau lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik dan nutrisi seseorang. Kemiskinan merupakan masalah inti dari sebuah perekonomian negara. Kemiskinan merupakan permasalahan serius di Indonesia yang masih berada pada jalur pembangunan ekonomi. Masih terdapat 24% dari 240 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, menurut tingkat

⁵⁰ Masyhudah Rosni Wahyu Suprianoor, Usamah Hanafie, "The Welfare of Rubber Farmer Family in Vilage 7 Wonorejo, Kusan Hulu District, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province," *Tugas Akhir Mahasiswa* 5, no. 1 (2021): 206–13, <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/fag>.

⁵¹ Yulia Adella Sari, "Pengaruh Kemiskinan Pengangguran Indeks Pembangunan Manusia Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 1–10, <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/785/481>.

kemiskinan yang didefinisikan sebagai mereka yang memiliki pendapatan tahunan kurang dari \$1.⁵²

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, karena memiliki sekitar 17.504 pulau. Sehingga dengan kondisi wilayah yang demikian ini, disamping sebagai Negara kepulauan, Negara Indonesia juga dikatakan sebagai Negara Bahari (Maritim) yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah, jika dibandingkan dengan Negara-negara lain. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat potensial adalah kekayaan hasil laut yang sangat melimpah. Namun ironisnya, masih banyak terdapat masyarakat nelayan yang berada pada garis kemiskinan. Pemerintah dalam hal ini, berbagai upaya yang dilakukan guna menentaskan kemiskinan, namun samapai sekarang ini tingkat kemiskinan masih belum mampu untuk diatasi, sehingga persoalan tentang kemiskinan bagaikan mengurai benang kusut yang sulit dicari penyelesaiannya.⁵³

Islam selalu hadir dalam setiap persoalan kehidupan tanpa terkecuali. tentang kemiskinan Islam memandang serius baik dari sisi konsep maupun penanganannya. Kata yang familiar dalam menggambarkan kemiskinan adalah kata 'fakir' dan kata 'miskin'. Menurut Saad Ibrahim, kata 'fakir' atau kefakiran merupakan kondisi kebutuhan masyarakat yang tidak tercukupi.⁵⁴ Dalam konteks ini, Islam menetapkan kewajiban untuk membantu sesama, karena tidak setiap orang mampu memperoleh kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diluar dari itu semua, Islam juga mewajibkan kepada setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Diluar dari itu semua, Islam juga mewajibkan kepada

⁵²Ronaldo Putra Pratama Sinurat, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Registratie* 5, no. 2 (2023): 87–103, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>.

⁵³Busyairi Ahmad, "Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural Pada Masyarakat Nelayan)," *Kopi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 4, no. 1 (2022): 1–17, <https://iyb.ac.id/jurnal/index.php/copisusu/article/view/223%0Ahttps://iyb.ac.id/jurnal/index.php/copisusu/article/download/223/197>.

⁵⁴Ismail, "Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam," *ESA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 110–34, file:///C:/Users/USER/Downloads/545-Article Text-4056-1-10-20230301 (2).pdf.

setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah/2:177 sebagai berikut.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya :

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁵⁵

Tafsir:

Ayat ini menjelaskan bahwa kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, yaitu salat tanpa dibarengi kekhusyukan dan keikhlasan, karena menghadapkan hal itu bukanlah pekerjaan yang susah. Tetapi kebajikan yang sesungguhnya itu ialah pada hal-hal sebagai berikut. Kebajikan orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat yang kurang mampu, anak yatim, karena mereka sudah kehilangan orang tua, sehingga setiap orang beriman patut memberikan kebaikan kepada mereka, orang-orang miskin yang hidupnya serba kekuarangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir yang kehabisan bekal perjalanan,

⁵⁵ Kementerian Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya

peminta-minta untuk meringankan penderitaan dan kekurangannya, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang timbul akibat praktik perbudakan. Orang yang mempunyai sifat-sifat ini, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah.

b. Jenis-Jenis Kemiskinan

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah dapat diartikan sebagai kemiskinan yang terjadi karena faktor psikologis, biologis, dan sosial. Faktor sosial seperti bermalas-malasan, kurangnya kemampuan intelektual, dan kelemahan jasmani.⁵⁶

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin. Hal tersebut terjadi disebabkan kebijakan pembangunan yang terfokus pada pertumbuhan dari pada pemerataan.⁵⁷

c. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

1) Kemiskinan *Absolut*

Kemiskinan *absolut* mengacu pada standar yang konsisten dan tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat, atau negara. Jika pendapatan seseorang berada di bawah garis

⁵⁶N D Utami, R Nurfalalah, and ..., "Analisis Adanya Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2021," *Jurnal Ekonomi, Bisnis ...* 1, no. 3 (2022): 162–75, <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/74%0Ahttps://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/download/74/62>.

⁵⁷Tuti Alawiyah and Farhan Setiawan, "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 15, no. 2 (2021): 131–54, <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>.

kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, maka ia termasuk dalam kelompok kemiskinan absolut.

2) Kemiskinan *Relatif*

Kemiskinan *relatif* suatu kondisi sosial yang disebabkan oleh kegagalan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan yang dapat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat dan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.⁵⁸

3) Kemiskinan Rural

Kemiskinan rural terjadi di daerah pedesaan di mana akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan seringkali terbatas. Faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur dan kesempatan kerja yang terbatas dapat memperparah kondisi kemiskinan di pedesaan.

4) Kemiskinan Urban

Kemiskinan urban seringkali terkait dengan tingkat pengangguran yang tinggi, pekerjaan tidak tetap, dan biaya hidup yang tinggi di kota-kota besar.

5) Kemiskinan Generasional

Kemiskinan generasional merujuk pada kondisi di mana kemiskinan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, ketidakstabilan ekonomi, dan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan.⁵⁹

⁵⁸ Karisma Agustiya et al., "Kontribusi Dinas Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jember," *Jurnal Pengabdian Mandiri* 3, no. 2 (2024): 193–200, <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/7478>.

⁵⁹ A., Zunaidi et al., "Manajemen Zakat Dan Waqaf" 3, no. 2 (2023): 40–44, [https://repository.iainkediri.ac.id/1034/1/Manajemen Ziswaf 2023.pdf](https://repository.iainkediri.ac.id/1034/1/Manajemen%20Ziswaf%202023.pdf).

d. Faktor-Faktor Kemiskinan

- 1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan).
- 2) Motivasi yang rendah.
- 3) Pandangan dalam hubungan kekeluargaan (cara pandang yang menganggap orang tua sebagai beban).
- 4) Terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai (gaji yang rendah dan waktu kerja yang banyak).
- 5) Tidak kreatif.⁶⁰

Faktor faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro yaitu:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- 3) Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal, seperti pendapatan karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena

⁶⁰ Sa'diyah El Adawiyah, "Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya", *Jurnal of Social Work and Social Service*, Vol 1, No 1, (2020) hal 49.

mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.⁶¹

e. Dampak Kemiskinan

1) Pengangguran merupakan dampak kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat. Maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan, dikarenakan sulit untuk bekerja.

2) Tingkat kematian meningkat, masyarakat Indonesia banyak mengalami kematian karena kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang alami.

3) Putus sekolah Tidak bersekolah (tingkat pendidikan yang rendah) ini membuat rakyat Indonesia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memperoleh pendapatan. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan.

4) Tingkat kejahatan meningkat, masyarakat Indonesia jadi terdesak untuk memperoleh pendapatan dengan cara kejahatan karena dengan cara yang baik mereka tidak mempunyai modal yaitu ilmu dan keterampilan yang cukup.⁶²

⁶¹Winne Ayunda Gaiska, Naufal Gama Affandyar, and Muhammad Yasin, "Analisis Penyebab, Konsekuensi, Dan Solusi Potret Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto Pasca Reformasi," *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 2 (2023): 141–49, <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i2.386>.

⁶²Ali Hardana et al., "Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kotanopan Secara Ekonomi Islam," *Dalwa Islamic Economic Studies* 3, no. 1 (2024): 189–206, <https://doi.org/10.38073/dies.v3i1.1520>.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah diagram yang memaparkan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.⁶³

Skema kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁶³IntaGregor Polancik, *Empirical Research Method Poster* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 37.

Kerangka berpikir studi ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wara Timur menjadi fokus penelitian untuk menentukan sejauh mana kebijakan Program Keluarga Harapan dapat mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Dan, untuk mencapai tujuan yang maksimal diperlukan pelaksanaan yang baik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Alhasil, Program Keluarga Harapan merupakan program yang membantu penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, pakaian, pendidikan, perumahan, dan kesehatan, dengan tujuan program pemerintah ini mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Antara lain, diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adalah mungkin untuk mengatakan bahwa kemiskinan dapat dikurangi jika kesejahteraan masyarakat ditingkatkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proposi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan.⁶⁴

Yang dimaksud metode penelitian kualitatif adalah penelitian ini bergerak menguraikan, membuat suatu informasi deskriptif bersifat kata tertulis atau narasi dari lisan orang-orang dan perilaku yang di amati. Data ini berupaya untuk memecahkan suatu masalah yang timbul berdasarkan data uji persyaratan dan interpretasi hasil dari penelitian tersebut.⁶⁵ Sedangkan metode *survey* yang dimaksudkan disini adalah metode penelitian yang memperoleh data dari informan dengan memakai teknik wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data yang substansial. Disisi yang lain, informan penelitian kali ini adalah masyarakat Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di masyarakat, Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, di antara penerima manfaat kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena mereka ingin

⁶⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

⁶⁵Robert B. Dugan Steven J Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 30.

mempelajari bagaimana kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bermaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus memberi batasan bagi penelitian yang bertujuan untuk memilah data yang relevan dan tidak relevan. Pemberian batasan dalam penelitian kualitatif ini lebih bertumpah pada tingkat urgensi dari suatu masalah yang sedang dihadapi pada penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo” yang mana objek utamanya ialah masyarakat penerima PKH di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

D. Desain penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif). Dalam penelitian kualitatif penulis ingin mencermati fenomena yang sulit dikuantifikasi dan deskriptif seperti langkah kerja, pengertian tentang suatu konsep yang bermacam macam, karakteristik suatu barang atau jasa, gambar gambar, tata cara suatu budaya dan sebagainya.

Metode kualitatif adalah metode dan pengetahuan berdasarkan metodologi yang mempelajari peristiwa sosial dan kesulitan masing-masing individu. membuat gambar kompleks, menulis kata, mencatat informasi dari gambar informan dan menyelesaikan studi alam. Metode kualitatif adalah hasil

yang dicapai penulis dalam bentuk tulisan tertulis atau lisan, yang benar-benar terjadi pada objek penelitian.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang bisa dilakukan peneliti.⁶⁶ Dalam penelitian ini data primer didapat langsung dari Masyarakat Kecamatan Wara Timur Kota Palopo yang dapat berupa wawancara langsung dengan narasumber yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer, yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial. Data sekunder juga dapat mencakup studi dokumentasi atau membaca referensi yang dapat dipercaya sesuai dengan pembahasan yang sedang dipelajari, serta data atau dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang sedang dibahas.⁶⁷

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini termasuk instrumen wawancara. Wawancara adalah metode perolehan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan secara lisan. Dalam hal ini proses tanya jawab dilakukan secara verbal maupun nonverbal dengan menggunakan sumber daya seperti instrumen. Instrumen

⁶⁶Dergibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 16.

⁶⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

berbentuk sebuah alat seperti telepon genggam dan alat tulis yang digunakan untuk memetakan seluruh informasi yang diterima informan. Instrumen yang digunakan adalah wawancara, dimana penulis atau peneliti menyiapkan rangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai bahan data dan sumber informasi.⁶⁸

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Inti dari observasi itu sendiri adalah adanya perilaku yang tampak dan dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dihitung dan dapat diukur.⁶⁹

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah strategi untuk melakukan penelitian yang melibatkan penyusunan sejumlah pertanyaan dari jenis yang luas untuk ditanyakan kepada subjek wawancara supaya pihak yang ditanya tahu bahwa dia sedang di wawancara dan bisa menjawab secara menyeluruh dan terbuka.⁷⁰ Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dimana dalam menjalankannya lebih leluasa dibanding dengan wawancara terstruktur. jenis wawancara, bertujuan untuk memperoleh permasalahan secara

⁶⁸Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Bogor: Mardi Yuana, 2011), 4.

⁶⁹Haris Herdiansah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 131.

⁷⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017).

terbuka dimana pihak yang sedang ditemani wawancara peneliti meminta saran dan ide-idenya.⁷¹

Wawancara secara *face to face* dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang menjadi informan dalam penelitian dan dalam menjalankan wawancara peneliti hanya diam mendengarkan, mencermati dan mencatat apa yang disampaikan pihak informasi dalam hal ini Masyarakat Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti: rincian data, catatan-catatan terkait dengan penelitian ini.

H. Keabsahan Data

Lincoln dan Guba tahun 1985 menyatakan bahwa untuk mencapai *trustworthiness* (kebenaran) dalam penelitian kualitatif, maka uji keabsahan data dapat dilakukan dengan kreadibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*fonfirmability*).

1. Kreadibilitas (*Credibility*)

Uji keabsahan data dengan *credibility* dilakukan dengan cara:

- a. Keterikatan yang lama (*prolonged engagement*), dimana peneliti tidak tergesa-gesa dalam pengumpulan data atau informasi tentang situasi yang diteliti.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

- b. Ketekunan pengamatan (*persistent observation*), teknik ini digunakan untuk memahami suatu gejala yang lebih mendalam, peneliti dapat menetapkan aspek-aspek yang penting dan relevan dengan topik penelitian.
- c. Melakukan triangulasi (*triangulation*), Moleong (2004) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari pengumpulan data.
- d. Mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga penelitian akan mendapatkan masukan dari orang lain.
- e. Kecukupan referensi, dalam konteks ini peneliti mengumpulkan referensi yang sesuai dengan objek penelitian.

Analisis kasus negatif (*negative case analysis*), dilakukan dengan cara meninjau ulang hal-hal yang sudah terjadi, tercatat dalam catatan lapangan, apakah masih ada data yang tidak mendukung atau tidak relevan dengan penelitian.⁷²

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas sejatinya memperhatikan kecocokan arti fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena diluar ruang lingkup studi, dengan cara melakukan uraian rinci dari data ke teori, atau dari kasus ke kasus lain, sehingga pembaca menerapkan dalam konteks yang hampir sama.

⁷² Hardiani et Al, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, n.d., 203.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dalam penelitian ini dependabilitas dibangun sejak pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data dalam penelitian. Uji keabsahan data dependabilitas dilakukan dengan teknik:

- a. Memeriksa bias-bias yang datang dari objek penelitian
- b. Mengkonfirmasi setiap simpulan yang ada dengan sumber data penelitian.
- c. Untuk mempertinggi *dependability* penelitian, peneliti dapat menggunakan dokumentasi berupa gambar, video, rekaman suara dalam pengambilan data penelitian di lapangan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas identik dengan objektivitas penelitian atau keabsahan deskriptif dan interpretatif. Keabsahan data dalam penelitian dibandingkan dengan menggunakan teknik mengkonsultasikan setiap langkah kegiatan kepada promotor atau konsultan sejak awal penelitian hingga penyusunan analisis data, dan penyajian data penelitian.⁷³

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan, teknik analisa data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi data dan kesimpulan.⁷⁴

⁷³ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, Dan Pendidikan*, 2007th ed. (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 168–69.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 88.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang dianalisis sehingga data-data tersebut dapat diangkat ke dalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun penelitian secara langsung. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum dan setelah selesai di lapangan. Kemudian diolah dan di analisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Data ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argument-argumen yang sesuai dengan apa adanya.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang berbentuk informasi baik itu lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Kemudian data di kelompokkan agar dapat dibedakan mana data yang di butuhkan dan mana data yang tidak di butuhkan. Setelah data dikelompokkan, selanjutnya penulis menjabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah di mengerti.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian dengan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data yang berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting, mencari tema dan pola dan membuang data yang

dianggap tidak penting. Adapun langkah-langkah dalam mereduksi data sebagai berikut:⁷⁵

- a. Memilih data yang dianggap penting
- b. Membuat kategori data
- c. Mengelompokkan data dalam setiap kategori

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (display data). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, kemudian data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan diarahkan agar akan semakin mudah untuk dipahami.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jika dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, piktogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.⁷⁶ Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian data dalam bentuk cerita.

4. Menarik Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

⁷⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 92.

⁷⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 95.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Setelah selesainya penelitian dan pengumpulan data di lapangan, yang mencakup wawancara dan pengamatan langsung, berbagai data diperoleh dari informasi utama dan informasi kunci sehubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pontap. Wawancara dan pengamatan langsung ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan selama penelitian ditampilkan dalam bentuk analisis data menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Tabel-tabel ini setelahnya akan dievaluasi.

Data primer yang dikumpulkan oleh penulis akan disajikan sebagai narasi atau deskripsi yang mencerminkan aktualitas situasi. Sumber data utama adalah narasi yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan peserta program keluarga harapan.

Ketika melakukan penelitian, perlu bagi kita untuk mewaspadaai kondisi lingkungan yang ada di lokasi yang akan berfungsi sebagai lokasi penelitian. Pada penelitian lokasi penelitiannya di Kelurahan Pontap yang terletak di Kecamatan Wara Timur. Salah satu dari 7(Tujuh) Kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur.

2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Mengutamakan Pelayanan Prima.

b. Misi

Menerapkan Pelayanan Gratis, Sederhana, Muda, Cepat, Tepat, dan Tidak Berbelit-belit.⁷⁷

3. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur memiliki luas wilayah 2.51 km atau 20,78%. yang terdiri dari 4 RT/RW, dengan jumlah kepala keluarga 1.883 KK.⁷⁸

4. Demografi (Kependudukan)

Dari hasil sensus partisipatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Batu Walenrang tahun 2024 terdapat 6.796 jiwa penduduk dengan klasifikasinya jumlah 3.457 jiwa untuk laki-laki dan jumlah 3.339 jiwa untuk perempuan.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per RT/RW di Kelurahan Pontap
Kecamatan Wara Timur September 2024**

No	RT/RW	KK	Jiwa
1	01	608	2.163
2	02	392	1.521
3	03	485	1.797
4	04	398	1.315
	Jumlah	1.883	6.796

Sumber: Diolah dari profil Kelurahan Pontap

⁷⁷ Profil Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur

⁷⁸ Profil Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang ada di Kelurahan Pontap berjumlah sangat banyak dari Kartu Keluarga. Selanjutnya untuk bidang keagamaan, Penduduk Kelurahan Pontap rata-rata menyakini dan menganut agama islam, untuk lebih jelasnya keadaan menurut agama yang diyakini oleh masyarakat Kelurahan Pontap yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penduduk menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Pontap

No	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Islam	3.393	3.281	6.674
2.	Kristen Protestan	33	34	67
3.	Kristen Khatolik	11	7	17
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	20	18	38

Sumber: Diolah dari profil Kelurahan Pontap

Dari data diatas terlihat jelas bahawa pada umumnya penduduk di Kelurahan Pontap menganut kepercayaan agama islam dengan jumlah 6.674 jiwa, penduduk yang menganut agama Kristen protestan berjumlah 67 jiwa, yang menganut agama budha berjumlah 38 jiwa.⁷⁹

⁷⁹ Profil Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur

5. Sarana dan Prasarana

a. Kantor Lurah

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Kantor Lurah

No	Jenis Gudang	Jumlah (Unit)
1	Kantor Lurah	1
	Jumlah	1

Sumber data : Kantor Kelurahan Pontap

b. Kesehatan

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Gedung Kesehatan Kelurahan Pontap

No	Jenis Gedung	Jumlah (Unit)
1	Posyandu	4
2	Aptotik	2
	Jumlah	6

Sumber data : Kantor Kelurahan Pontap

c. Pendidikan

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Pontap

No	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1	TK	2
2	SDN	2
3	Perpustakaan Desa	1
	Jumlah	5

Sumber data : Kantor Kelurahan Pontap

d. Rumah Ibadah

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Rumah Ibadah Kelurahan Pontap

No	Jenis Gedung	Jumlah (Unit)
----	--------------	---------------

1	Masjid	2
	Jumlah	2

Sumber data : Kantor Kelurahan Pontap

e. Kebersihan

Tabel 4.7 Jumlah Sarana Kebersihan Kelurahan Pontap

No	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1	TPS	5
2	Gerobak Sampah	4
3	Tong Saampah	4
	Jumlah	13

Sumber data : Kantor Kelurahan Pontap⁸⁰

6. Identitas Informan Pendamping PKH

Tabel 4.8 Data Informan Pendamping PKH

No	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Usia	Pendapatan
1.	Pendamping PKH	S1	38	Rp.3.000.000,00

Sumber : Wawancara Penelitian 2025

7. Identitas Informan yang menerima PKH

Tabel 4.9 Rincian Data yang Diberikan oleh Informan Penelitian Menurut

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	0
Perempuan	10
	10

Sumber : Wawancara Penelitian 2025

⁸⁰ Kantor Kelurahan Pontap

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar informan berasal dari wanita, karena total ada delapan dari mereka. Akibatnya, mayoritas masyarakat yang diuntungkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah perempuan karena biasanya perempuan yang mengontrol anggaran rumah tangga.

Tabel 4.10 Distribusi Data Informan Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
17-25	-
26-34	1
35-43	5
44-52	2
>53	2
	10

Sumber : Wawancara Penelitian 2025

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa orang-orang dengan informasi terbanyak adalah mereka yang berusia antara 35 sampai 43 tahun, yaitu sebanyak 5 orang.

Tabel 4.11 Jumlah Data Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah
Tidak Tammat SD	-
SD	1
SMP	2
SMA	7
	10

Sumber : Wawancara Penelitian 2025

Menurut tabel di atas, informan yang telah menyelesaikan pendidikan SD, yaitu sebanyak 1 orang, SMP yang sebanyak 2 orang, tidak menyelesaikan SD

tidak ada, dan lulus SMA sebanyak 5 orang, menandakan bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Pontap tergolong masih rendah karena minatnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebab, sebagian besar informan memiliki jenjang pendidikan SMA yang terdiri dari lima orang.

Tabel 4.12 Distribusi Data Informan Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Ibu Rumah Tangga	9
Penjual	1
	10

Sumber : Wawancara Penelitian 2025

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hampir sebagian besar informan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yakni sebanyak 7 orang dan yang bekerja sebagai penjual hanya sebanyak 1 orang.

Tabel 4.13 Distribusi Data Informan Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan Perbulan	Jumlah
<500.000	0
500.000-1.000.000	1
1.000.000-2.000.000	3
2.000.000-3.000.000	4
>3.000.000	2
	10

Sumber : Wawancara Penelitian 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan bulanan sebagian besar informan lebih rendah dari Rp 500.000 yakni sebanyak 0, sebanyak 1 orang berpenghasilan di antara Rp 500.000-1.000.000 juta rupiah, sebanyak 3 orang berpenghasilan diantara Rp 1.000.000-2.000.000, sebanyak 4 orang

berpenghasilan diantara Rp 2.000.000-3.000.000 dan sebanyak 2 orang berpenghasilan Rp 3.000.000.

Tabel 4.14 Distribusi Data Informan Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah
1-3	3
4-6	7

Sumber : Wawancara Penelitian 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anggota keluarga informan berkisar antara 1-3 orang, yaitu sebanyak 3 informan, sedangkan yang lain berkisar antara 4-6 orang, yaitu sebanyak 7 informan.⁸¹

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian bantuan tunai dengan syarat tertentu. PKH mulai dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2007 dan menjadi salah satu bagian dari strategi perlindungan sosial nasional. Program ini menargetkan keluarga miskin dengan anggota keluarga yang termasuk dalam kategori rentan, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki berbagai tujuan yang saling

⁸¹ Wawancara Penelitian 2025

berkaitan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, tujuan PKH mencakup:

1. Mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat.
2. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan anak-anak.
3. Meningkatkan akses pendidikan untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal.
4. Memberikan perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas agar mendapatkan perawatan yang layak.
5. Memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
6. Meningkatkan kesadaran sosial dan kemandirian keluarga miskin melalui pendampingan dan pemberdayaan ekonomi.

PKH memberikan banyak manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan pelaksanaan yang efektif, PKH dapat menjadi salah satu program unggulan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Terkait dengan hal ini peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, dengan menghasilkan fakta dan data dari beberapa informan dimana salah satu nya dengan menanyakan kepada pendamping PKH Kelurahan Pontap ibu Veronika terkait PKH, beliau menjawab:

“ PKH itu adalah bantuan tunai tapi ada syaratnya, kenapa dibilang ada syaratnya karena tidak semua orang dapat yang pastinya syaratnya yang pertama adalah miskin da nada didata kemiskinan, yang kedua dia harus punya komponen dimana komponen di PKH itu ada 3. Ada komponen

kesehatan yang meliputi ibu hamil sama balita, ada komponen anak sekolah usia dari SD sampai SMA jadi dari usia 7 tahun sampai 20 tahun, terus yang ketiga ada namanya komponen kesejahteraan social itu untuk lansia dan disabilitas.”

Pendapat tersebut di perkuat dengan aturan PKH Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, pada Pasal 4 (1) Sasaran PKH Akses adalah keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa kriteria yang mendapatkan bantuan dari PKH yaitu orang kurang mampu. Pada Program Keluarga Harapan, terdapat beberapa kriteria komponen yang mendapatkan bantuan tersebut. Pertama, komponen kesehatan, meliputi ibu hamil atau menyusui juga anak baru lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun. Kriteria komponen kedua, anak yang masih duduk di bangku sekolah sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Kriteria komponen ketiga, yaitu kesejahteraan sosial, mencakup lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas, namun diutamakan penyandang disabilitas berat.⁸²

Dari penjelasan ibu Veronika selaku pendamping PKH Kelurahan Pontap di pahami bahwa masyarakat yang ingin terdaftar dalam calon penerima PKH itu harus di seleksi sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Komponen ibu hamil dan balita dalam Program Keluarga Harapan (PKH), ibu hamil dan balita

⁸² A A I Suwandewi and D Rahmadanik, “Program Keluarga Harapan Menangani Kemiskinan Di Kelurahan Klampis Ngasem,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP ...* 10, no. 1 (2024): 1–11, <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/12696>.

termasuk dalam kategori komponen kesehatan. Komponen ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga usia dini, dengan tujuan utama mencegah stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta memastikan akses layanan kesehatan yang optimal bagi mereka.

Komponen ibu hamil dan balita dalam PKH merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mencegah stunting, serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Dengan bantuan tunai serta kewajiban pemeriksaan kehamilan dan imunisasi anak, program ini memberikan dampak positif yang besar bagi keluarga miskin di Indonesia. Dengan upaya yang tepat, PKH dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan.

Sedangkan komponen anak Sekolah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu aspek penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak putus sekolah karena kendala ekonomi. Komponen ini tergolong pada tingkat pendidikan bagaimana PKH ini bisa membantu dan memastikan anak penerima dari program ini mendapatkan pelayanan serta akses pendidikan yang layak. Dengan hal itu bantuan PKH pada komponen ini dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah, mampu mengurangi angka putus sekolah terutama di tingkat dasar dan menengah, membantu orang tua dalam membiayai pendidikan anak mereka seperti pembelian seragam dan alat belajar.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya memberikan bantuan bagi

ibu hamil, anak-anak, dan keluarga miskin, tetapi juga memiliki komponen khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas berat. Komponen ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. PKH juga menyediakan pendampingan sosial dan edukasi bagi keluarga, sehingga mereka bisa lebih memahami cara merawat lansia dan penyandang disabilitas dengan baik. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan peduli terhadap kelompok rentan.

Untuk mendalami terkait dengan ketiga komponen tersebut peneliti menanyakan kepada pendamping PKH mengenai seperti apa spesifikasi dalam nominal yang di dapatkan para penerima berdasarkan komponen tersebut, ibu Veronika menjawab:

“ Jadi bantuannya itu kalau untuk kesehatan yah ibu hamil sama balita Rp.750.000,00 per satu tahap dan ibu hamilnya itu hanya sampai hamil kedua.. Terus yang usia sekolah SD-SMA, SD itu Rp.225.000,00 per anak kalau SMP itu Rp.375.000,00 per anak dan SMA itu Rp.500.000,00 per anak. Ini maksimal kalau bukan 3 atau 4 per keluarga, , terus untuk disabilitas dalam artian cacat sama lansia umur 60 tahun seperti yang saya bilang tadi minimal dia kelahiran desember 1964 dan disabilitasnya bagus, lansia Rp.600.000,00.”

Pendapat tersebut di perkuat oleh salah satu penerima PKH di Kelurahan

Pontap yang berkategori penerima yang memiliki balita menyatakan bahwa:

“ Iya dek, Alhamdulillah setiap pencairan saya selalu dapat uang sekitar Rp. 750.000,00 itu mi saya pake untuk tambah tambah beli susu dan perlengkapannya anakku sama biasa kalau ada lagi lebihnya pake tambah-tambah kebutuhan sehari-hari keluarga.”⁸³

⁸³ Wawancara Ibu Maya, Ibu Rumah Tangga, Januari 2025

Berdasarkan penjelasan yang di sampaikan oleh ibu Veronika bahwa dalam ketiga komponen yang menerima PKH itu di golongkan dalam 3 komponen yaitu tingkat kesehatan atau ibu hamil dan balita, tingkat pendidikan atau anak sekolah, serta tingkat kesejahteraan social yang merupakan lansia dan disabilitas. Dari ketiga komponen tersebut tentu nominal bantuan yang akan diterima oleh masing-masing penerima PKH itu berbeda jumlahnya, ini dikarenakan pastinya setiap kebutuhan dari ketiga komponen yang menerima PKH itu berbeda sehingga di harapkan penerimaan jumlah dana yang diterima itu bisa di gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Bantuan untuk ibu hamil dan balita menjadi yang paling banyak diterima oleh penerima PKH dibandingkan komponen yang lainnya karena ibu hamil dan anak usia dini membutuhkan gizi yang baik, imunisasi, serta perawatan kesehatan yang lebih intensif. Bantuan ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah stunting pada anak-anak. Untuk bantuan penyandang disabilitas dan lansia menjadi urutan kedua dalam besaran dana PKH di karenakan mereka memerlukan perawatan khusus dan sering kali tidak memiliki penghasilan sendiri. Bantuan ini bertujuan untuk membantu keluarga dalam merawat lansia dan penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Berbeda halnya dengan bantuan untuk anak sekolah yang mendapatkan jumlah dana yang jauh lebih kecil dibandingkan dua komponen di atas, hal ini disebabkan kebutuhan anak sekolah yang tidak terlalu banyak dan mendesak. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar nominal bantuan karena kebutuhan sekolah (buku, seragam, transportasi, dll.) juga semakin meningkat.

Mengenai hal ini untuk menggali secara detail implementasi PKH di kelurahan Pontap peneliti menanyakan kepada pendamping PKH terkait mekanisme pendaftaran atau syarat untuk bisa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, ibu Veronika menjawab:

“Untuk calon peserta PKH ketika mereka ingin masuk ke PKH itu pendamping cuma berfungsi untuk memverifikasi. Jadi yang mengusulkan itu semua bantuan ada di Kelurahan kami sebagai pendamping hanya menerima data saja terkait nama-nama yang menerima data. Cuma dari data nama yang menerima PKH kami tetap melakukan pengecekan seperti survey untuk mengetahui apakah layak atau tidak.”

Hal tersebut di perkuat oleh argumentasi lurah Pontap bapak Abdullah ketika peneliti menanyakan sekaitan prosedur pendaftaran PKH yang sepenuhnya dilakukan oleh pihak kelurahan, beliau menjawab:

“ Iya memang benar bahwa pendafaran calon penerima PKH ini di lakukan oleh kelurahan, dimana prosedurnya itu kami mengecek terkait warga kami dan ketika mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan ini maka nanti akan dimintai berkas melalui RW/RT dan nantinya akan di proses lagi siapa saja yang berhak menerima serta setelahnya baru kami menyerahkan data nama penerima PKH di Kelurahan Pontap yang telah di data dan di olah melalui seleksi yang nantinya kembali di verifikasi dan di cek oleh pendamping PKH”

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan dari pendamping PKH serta di perkuat melalui argumentasi yang di berikan oleh Lurah Pontap dapat di pahami bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan untuk menjadi penerima PKH itu melalui tahapan yang di lakukan oleh pihak kelurahan. Untuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), seseorang harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tentunya bagi masyarakat yang tergolong dalam masyarakat yang miskin nantinya akan di data dan dilihat kelayakan untuk bisa menerima bantuan

PKH dikarenakan banyak fase atau syarat yang harus bisa di penuhi agar mendapatkan bantuan ini, untuk pihak kelurahan pastinya akan mengecek data masyarakat untuk di olah dan di lihat berdasarkan kualifikasi syarat untuk menerima PKH siapa saja masyarakat yang berhak dan layak. Bila proses pengecekan atau pengumpulan data masyarakat telah rampung nantinya dilakukan pengumpulan berkas tambahan untuk di lakukan proses verifikasi sebelum masyarakat mendapatkan dana bantuan PKH, dari proses ini akan menghasilkan nama-nama masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut dan melakukan pengambilan ATM dan penarikan dana di bank.

Berdasarkan data yang telah di keluarkan oleh pihak Kelurahan nantinya akan diberikan oleh pendamping PKH, di sinilah akan di lakukan proses pengecekan ulang kepada penerima PKH tersebut mengenai kelayakannya untuk mendapatkan bantuan PKH. Ketika sudah di lakukan proses cek data penerima maka pendamping akan terjun ke lapangan atau titik titik lokasi rumah penerima PKH untuk di survey, ini dilakukan untuk melihat kondisi secara fisik keadaan dari penerima dan melakukan wawancara guna memastikan kondisi ekonomi agar bantuan ini bisa di dapatkan oleh orang yang memang layak dan membutuhkan.

Proses ini tentu harus dan wajib dilakukan oleh pendamping PKH dikarenakan jika ini tidak dilakukan nantinya banyak penerima PKH yang harusnya tidak berhak mendapatkan bantuan PKH malah dapat, hal ini bisa terjadi karena dalam pemilihan data penerima PKH yang di lakukan oleh pihak kelurahan itu hanya berdasarkan data dan tentu itu dapat berbuah sewaktu-waktu maka dari

itu sangat penting juga pengecekan data yang teliti dan cermat agar nantinya data nama penerima PKH yang di berikan kepada pendamping itu sudah layak. Bukan hanya untuk memastikan bahwa masyarakat yang menerima PKH itu layak tetapi salah satu tujuan pendamping melakukan survey untuk pengecekan salah satunya agar masyarakat bisa mendapatkan pemahaman untuk menggunakan dana bantuan yang telah di dapatkan dengan baik dan benar.

Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Penggunaan dana PKH diharapkan sesuai dengan tujuan utama program ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Dana PKH sebaiknya digunakan untuk membantu kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga miskin, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Penggunaan yang tidak tepat, seperti membeli barang mewah atau kebutuhan konsumtif yang tidak mendukung kesejahteraan, harus dihindari. Dengan pemanfaatan yang benar, PKH dapat menjadi program yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan dana PKH yang baik dan sesuai kebutuhan tentu akan berdampak pada tingkat kualitas penerima itu sendiri, dan juga membuktikan bahwa dalam pengimplementasian Program Keluarga Harapan khususnya di Kelurahan Pontap bisa di laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian dana yang di dapatkan oleh masyarakat ketika dikelola dan di gunakan dengan baik bisa menghasilkan dampak yang sangat positif bagi perekonomian

terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan. Disinilah pentingnya edukasi yang diberikan oleh pendamping PKH agar masyarakat yang mendapatkan bantuan ini bijak dalam menggunakan dana tersebut, sekiranya bantuan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan juga keperluan sekolah anak itu sangat membantu dan juga bisa memberikan nutrisi terkhususnya pada ibu hamil dan balita untuk mengurangi resiko terkena stunting pada calon bayi ataupun balita.

Berdasarkan data dan fakta yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat pada pengimplementasian Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Hal ini dapat dilihat dimana saya menggali informasi melalui pendamping PKH dengan menanyakan apakah PKH dalam pengimplementasiannya di Kelurahan Pontap dapat mengatasi kemiskinan, ibu Veronika menjawab:

“ Mampu, karena terbukti saya selama kurang lebih dua tahun di Pontap sudah ada beberapa yang memang sukarela mau mundur, jadi mereka merasa memang saya sudah tidak pantas untuk ada di PKH akhirnya mereka mundur. Hanya karena Pontap itu hampir sebagian besar mata pencahariannya nelayan yah, seperti yang kita ketahui nelayan kadang ada kadang tidak ada. Makanya itu di Pontap banyak penerima PKH, namun yang mau keluar hanya beberapa karena itu tadi factor penghasilan yang hanya nelayan karena kemarin saja yang keluar itu hanya beberapa yang berpenghasilan nelayan itu karena mereka punya perahu sendiri untuk cari ikan. Jadi bukan lagi pekerja tapi mereka memiliki perahu sendiri.”⁸⁴

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan lurah pontap bapak Abdullah mengenai peranan dari PKH dalam mengatasi kemiskinan di daerah kepimpinannya, beliau menjawab:

“ Iya, dengan kehadiran Program PKH ini sangat membantu masyarakat

⁸⁴ Veronika, Pendamping PKH Kelurahan Pontap, Januari 2025

untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan social ini sangat memberikan dampak positif terutama dalam hal penanganan kemiskinan di kelurahan Pontap”⁸⁵

Kelurahan Pontap memang di dominasi hampir sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan dikarenakan wilayahnya yang berada di pinggir laut, maka tidak mengherankan banyak penerima PKH yang keluarga sebagai nelayan. Dengan hal ini tentu beberapa penerima PKH yang sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan ini di karenakan sudah dalam keadaan ekonomi yang sejahtera, pemberian bantuan dana bantuan yang di dapatkan oleh hampir sebagian berprofesi sebagai pelaut tentunya dana yang diterima tersebut di gunakan untuk kebutuhan dalam melaut.

Untuk mengetahui lebih dalam peneliti melakukan wawancara dengan salah satu mantan penerima PKH di Kelurahan Pontap namun sudah dalam kategori sejahtera yaitu:

“ Iye nak dulu memang saya pernah dapat bantuan PKH, cuman setelah beberapa kali saya dapat Alhamdulillah semakin bagus ekonominya keluarga makanya saya putuskan untuk mundur karena masih banyak masyarakat yang layak dapat dari pada saya nak.”⁸⁶

Bantuan dana PKH tidak hanya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan bisnis, karena dengan hal tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang nantinya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Dengan adanya penerima PKH yang dapat mengubah perekonomiannya sangat berdampak positif dan berpengaruh pada tingkat

⁸⁵ Abdullah, Lurah Pontap, Januari 2025

⁸⁶ Wawancara Ibu Sarah, Ibu Rumah Tangga, Januari 2025

kemiskinan dikarenakan masyarakat penerima PKH yang sudah keluar dapat digantikan kepada calon penerima PKH yang lainnya. Sehingga nantinya banyak masyarakat miskin yang bisa terdampak bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, apabila semakin banyak masyarakat penerima bantuan ini bisa sejahtera dan keluar dari PKH maka dapat dikatakan itu akan mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya terkhusus pada Kelurahan Pontap.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti khususnya di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur, dari beberapa informasi serta data yang didapat peneliti, maka peneliti dapat memberikan deskriptif hasil pada penelitian yang berjudul Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Pada implementasi PKH yang telah dilakukan di Kelurahan Pontap berjalan dengan sangat baik, hal ini didukung berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti bahwa masyarakat yang telah mendapatkan bantuan ini merupakan penerima yang layak berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pendamping PKH.

Penerima PKH yang ada di Kelurahan Pontap mereka terbagi ke beberapa komponen dan mendapatkan nominal dana bantuan sesuai dengan kualifikasi komponen nya masing-masing. Dengan pemberian dana bantuan PKH masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan anak untuk sekolah mereka, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dari penerima bantuan maka itu dapat mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup melalui usaha yang dilakukan. Implementasi PKH

yang ada di kelurahan Pontap dapat dilihat melalui penerima PKH yang beberapa orang telah keluar dari PKH dengan sukarela karena merasa sudah tidak pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut karena sudah memiliki perekonomian yang baik atau sejahtera. Hal ini berdampak positif bagi masyarakat miskin lainnya untuk juga bisa mendapatkan bantuan PKH melalui pergantian bagi yang sudah keluar dan berdampak positif bagi kelurahan Pontap dalam mengatasi kemiskinan.

2. Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana individu dan kelompok dalam suatu komunitas dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, hidup dengan aman, sehat, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep kesejahteraan mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kebebasan sosial. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan suatu negara, karena mencerminkan kualitas hidup penduduknya. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh. Aspek dalam kesejahteraan itu meliputi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan kesehatan, kesejahteraan Pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhususnya di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur dengan pemberian bantuan PKH yang nantinya dengan bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat itu bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas hidup mereka.

a. Kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan ekonomi adalah kondisi di mana individu atau masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, serta merasakan stabilitas finansial yang berkelanjutan. Kesejahteraan ekonomi mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara dan masyarakatnya. Kesejahteraan ekonomi adalah kunci bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan stabilitas suatu negara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pendidikan yang baik, serta kebijakan yang mendukung pemerataan kesejahteraan, maka masyarakat dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera.

PKH berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui beberapa aspek diantaranya, bantuan tunai untuk kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli masyarakat, mencegah generasi miskin baru, mendorong kemandirian ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk menggali lebih dalam terkait dengan hal tersebut peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai hal tersebut kepada para penerima PKH.

Ibu Sukmawati, ibu rumah tangga

"Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan sekolah anak-anak"⁸⁷

Hal ini di dukung oleh pendapat salah satu penerima PKH yang lainnya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Ibu Iramaya, ibu rumah tangga

⁸⁷ Wawancara Ibu Sukmawati, Ibu Rumah Tangga, Januari 2025

"Iye dengan PKH bagus ekonomi nya keluarga nak, cukup untuk dipakai beli sembako dan anak sekolah"⁸⁸

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pemberian bantuan PKH dengan dana yang cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan sehari-hari penerima. Dengan pemenuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat salah satunya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bahkan di gunakan untuk kebutuhan bisnis sangat bisa menghasilkan tingkat kesejahteraan pada penerima PKH. Berdasarkan penerapan kesejahteraan ekonomi yang baik dapat menurunkan tingkat kemiskinan terkhususnya yang ada pada Kelurahan Pontap, dengan hal tersebut sangat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah yang sampai sekarang sulit dihilangkan dengan adanya implementasi PKH yang dapat mengurangi dampak kemiskinan.

Selain juga dapat memberikan kemandirian ekonomi ketika kesejahteraan ekonomi masyarakat baik, itu dapat dilihat bagaimana masyarakat penerima PKH bisa menggunakan dana bantuan untuk melakukan usaha atau bisnis. Dengan hal tersebut tentu dapat mendongkrak ekonomi masyarakat ataupun meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penambahan dana atau pemasukan melalui hasil usaha yang dikerjakan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui PKH juga dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada kelompok paling rentan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

b. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana individu atau kelompok

⁸⁸ Wawancara Ibu Iramaya, Ibu Rumah Tangga, Januari 2025

dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, hidup dengan layak, dan memiliki perlindungan dari risiko sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Kesejahteraan sosial mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan hak-hak sosial lainnya yang memungkinkan setiap orang berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bermartabat. Tujuan dari kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Meningkatkan kualitas hidup baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Mengurangi kesenjangan social dengan menciptakan peluang yang setara bagi seluruh masyarakat.

Kesejahteraan sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mewujudkannya. Salah satu program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah dengan memberikan program bantuan PKH bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. PKH berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui beberapa aspek utama yaitu peningkatan kesehatan, bantuan diberikan kepada ibu hamil dan anak balita untuk memastikan akses ke layanan kesehatan, seperti imunisasi dan pemeriksaan kehamilan. Pendidikan, bantuan diberikan kepada anak usia sekolah agar mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia, PKH juga mencakup bantuan untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat dan lansia

agar mereka tetap mendapatkan perhatian dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Untuk mendalami terkait dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan penerima PKH untuk mencari fakta dan data terkait efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesejahteraan sosial.

Ibu Adelia, Penjual

" Alhamdulillah, dengan uang yang ku dapat dari bantuan PKH nak bisa untuk na cukupi kebutuhan dirumah. Selama juga dapat PKH mudah ku akses layanan kesehatan, anak-anak juga alhamdulillah dapat bantuan disekolah karena PKH"⁸⁹

Dari wawancara penelitian yang di lakukan oleh penelti dalam mendalami peran pengimplementasian PKH dalam aspek kesejahteraan terutama kesejahteraan social tentu dapat diketahui bahwa memang salah satu program untuk mengatasi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan social masyarakat yaitu PKH sangat membantu masyarakat bukan hanya untuk ekonomi tapi juga kebutuhan sosialnya terpenuhi. Tentu sangat banyak bantuan dalam aspek kesejahteraan social terutama pada penyandang disabilitas dan juga lansia ini merupakan hal yang sangat di perhatikan guna memberikan pelayanan yang baik agar masyarakat terutama lansia dan juga penyandang disabilitas bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan para masyarakat lainnya. Dengan bantuan PKH masyarakat yang menyandang disabilitas dan lansia bisa mendapatkan pelayanan yang baik tentu ini akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki.

Dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menerima PKH terutama dalam bidang kesejahteraan social itu sangat membantu masyarakat

⁸⁹ Wawancara Ibu Adelia, Penjual, Januari 2025

terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga bisa membuka usaha yang dapat menunjang penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. Peningkatan kesejahteraan social yang baik dapat membuat kesetaraan ekonomi di lingkungan masyarakat sehingga bisa mengatasi untuk mengurangi kemiskinan yang dimana itu sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

c. Kesejahteraan Kesehatan

Kesejahteraan kesehatan adalah kondisi di mana seseorang mencapai tingkat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Ini bukan hanya tentang tidak adanya penyakit, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang memungkinkan individu untuk hidup dengan kualitas yang baik dan produktif. Salah satu aspek penting dalam PKH adalah kesejahteraan kesehatan, yang mencakup bantuan dan akses layanan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Beberapa komponen dalam kesejahteraan kesehatan dalam PKH yaitu bantuan untuk ibu hamil dan balita, dukungan bagi penyandang disabilitas dan lansia, akses layanan kesehatan, pendampingan dan penyuluhan kesehatan. Secara keseluruhan, kesejahteraan kesehatan dalam PKH bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok rentan dalam masyarakat miskin memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Terkait dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang menerima PKH.

Ibu Adriana, Ibu rumah tangga

"Iyee, ada perubahan semenjak saya dapat bantuan PKH karena mudah ku dapatkan itu pelayanan untuk kesehatan karena penerima PKH ka nak"⁹⁰

⁹⁰ Wawancara Ibu Adriana, Ibu Rumah Tangga, Januari 2025

Dari pendapat yang di kemukakan oleh ibu Adriana diketahui bahwa PKH sangat berdampak bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang bisa mudah di akses terutama bagi penyandang disabilitas dan juga lansia. Hal ini sangat membantu bagi ibu hamil dan balita karena harus mendapatkan perhatian yang khusus juga dikarenakan komponen ibu hamil dan balita termasuk dalam PKH. Pemenuhan nutrisi dan vitamin bagi ibu hamil dan balita sangatlah penting dan disini kita bisa melihat dengan peningkatan kesejahteraan kesehatan yang baik dapat membuat kesehatan masyarakat terutama masyarakat yang menerima PKH menjadi lebih baik, dengan hal itu bisa membuat peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi resiko penyakit yang di derita oleh masyarakat agar masyarakat dapat melakukan kegiatan dan aktivitas terutama dalam bisnis dengan baik. Dengan hal tersebut bisa dengan maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan terutama pada Kelurahan Pontap.

d. Kesejahteraan Pendidikan

Kesejahteraan pendidikan merujuk pada kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan yang berkualitas, serta lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, emosional, dan sosial mereka. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga pendidik yang berkualitas, kurikulum yang relevan, serta dukungan finansial dan psikososial bagi peserta didik. Adapun aspek yang merujuk pada kesejahteraan pendidikan yaitu aksesibilitas pendidikan,

kualitas pendidikan, kesejahteraan siswa, dukungan finansial, pendidikan berkelanjutan dan inklusif. Kesejahteraan pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan peserta didik, guru, dan seluruh ekosistem pendidikan perlu menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

Kesejahteraan Pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu aspek utama dalam PKH adalah kesejahteraan pendidikan, yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat (KPM). PKH berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan bagi keluarga miskin di Indonesia. Dengan adanya bantuan ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

Untuk mendalami terkait dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penerima PKH untuk mengonfirmasi terkait dengan kesejahteraan pendidikan yang di rasakan.

Ibu Elyati, Ibu rumah tangga

“ Iye, terbantu sekali karena bantuan PKH ini uang nya bisa saya belikan perlengkapan sekolah anak- anak, disekolah juga diutamakan yang dapat PKH untuk dapat bantuan disekolah makanya Alhamdulillah anak ku dapat bantuan disekolah karena punya PKH”⁹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dengan pemberian bantuan dana PKH kepada masyarakat yang tergolong dalam ekonomi yang miskin dapat membantu perekonomian bahkan untuk keperluan sekolah anaknya.

⁹¹ Wawancara Ibu Dhita, Ibu Rumah Tangga, Januari 2025

Bantuan dana PKH memang beragam jumlah nominal yang akan di dapatkan oleh masyarakat penerima terutama dalam aspek pendidikan, sehingga penggunaan dari dana bantuan tersebut bisa digunakan untuk hal yang sesuai dengan aturan dan bisa efektif saat di gunakan oleh masyarakat. PKH juga memiliki keistimewaan tersendiri bagi anak yang menerima bantuan ini dikarenakan bisa mudah mendapatkan akses pendidikan dengan mudah dan juga dapat menjadi pertimbangan untuk mendapatkan bantuan yang ada di sekolah mereka. Hal tersebut di rasakan langsung oleh ibu Dhita setelah mendapatkan bantuan PKH karena pada awalnya anaknya hampir tidak pernah mendapatkan bantuan di sekolah namun setelah mendapatkan bantuan PKH itu bisa menjadi pertimbangan sehingga anak penerima PKH bisa menjadi prioritas.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Domri “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Bahwa Program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Berdasarkan hasil penelitian di atas di bandingkan dengan hasil penelitian ini dimana dalam Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan berdasarkan indicator yang telah di gunakan, walaupun masih ada beberapa kendala yang harus diatasi sehingga dapat dikatakan bahwa PKH berjalan cukup optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo sudah terlaksana sesuai dengan harapan hal ini dapat dilihat melalui terpenuhinya indikator.

1. Implementasi pada pelaksanaan PKH di Kelurahan Pontap berjalan baik dan dilakukan sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada.
2. Peningkatan kesejahteraan di Kelurahan Pontap melalui bantuan PKH dapat dikatakan berjalan cukup optimal dikarenakan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

B. Saran

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan.
2. Diharapkan adanya proses pengawasan yang dilakukan oleh pendamping PKH agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal.
3. Hendaknya pemerintah atau pihak terkait seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan informasi dan membuat jadwal kemasyarakatan soal pencairan dana bantuan ini, agar masyarakat tidak kebingungan mengenai kapan dana bantuan ini bisa diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiya, Karisma, Desy Wulandary, Nur Faizah Badriyatun Nufus, and Hikmatul Hasanah. "Kontribusi Dinas Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian Mandiri* 3, no. 2 (2024): 193–200. <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/7478>.
- Ahmad, Busyairi. "Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural Pada Masyarakat Nelayan)." *Kopi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 4, no. 1 (2022): 1–17. <https://iyb.ac.id/jurnal/index.php/copisusu/article/view/223%0Ahttps://iyb.ac.id/jurnal/index.php/copisusu/article/download/223/197>.
- Al, Hardiani et. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, n.d.
- Alawiyah, Tuti, and Farhan Setiawan. "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 15, no. 2 (2021): 131–54. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>.
- Alwi, Muhammad, and Marwati Sulni. "Program Keluarga Harapan Dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11 (2022): 307–19. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2458>.
- Aprilia Puntorini, Sukma, and Eko Priyo Purnomo. "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Rangka Pengurangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Bantul Tahun 2018." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2020): 230–42. <http://doi.org/10,21009/JKKP.072.10>.
- Aulya Wardani, Winda, M. Ismail, Edy Kurniawansyah, and Sawaludin Sawaludin. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 4 (2023): 2189–96. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706>.
- Baiq Dewi Kamariani, Nur Fitri Eka Asbarini, Asrifia Ridwan, and Abdul Chalel Rahman. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Journal of Administrative and Social Science* 5, no. 1 (2024): 205–19. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Bustamam, Nawarti, Shinta Yulyanti, and Kantthi Septiana Dewi. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ekonomi KIAM* 32, no. 1 (2021): 85–92. [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(1\).7677](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(1).7677).
- Dr. H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H., M.Si. Dr. Safrizal ZA, and M.Hum. Dr. Mahdi Syahbandir, S.H. *Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia*. Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Aceh, 2024.
- Elia, Fitri Aningsih. “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika.” *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)* 5, no. 1 (2021): 15–42. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/152>.
- Fadilah, Nur. “Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 51. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Fakultas, Fasiha, Ekonomi Dan Bisnis, and Muhammad Alwi. “Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan the Urgence of Financial Management of Households Beneficiaries of the Hope Family Program in Increasing Welfare” 9, no. 01 (2023).
- Hamida, Ambas, Muhammad Nur Alam Muhajir, Sukran Sukran, and Muni Paulus. “Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being?” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 27, no. 1 (2023): 10–20. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>.
- Hardana, Ali, Sulaiman Efendi Siregar, Lismawati Hasibuan, and Try Wahyu Utami. “Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kotanopan Secara Ekonomi Islam.” *Dalwa Islamic Economic Studies* 3, no. 1 (2024): 189–206. <https://doi.org/10.38073/dies.v3i1.1520>.
- Herdiansah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Nurinda; Ramli Mahmud; Sastro M. Wantu. “Pelaksanaan PKH Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 1–23.
- IntaGregor Polancik. *Empirical Research Method Poster*. Jakarta: Gema Insani, 2009.

- Ipah Nazira, Masrizal, Firdaus Mirza Nusuary. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Ilmial Mahasiswa* 7, no. 4 (2022): 16. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22344/10461>.
- Ismail. "Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam." *ESA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 110–34. [file:///C:/Users/USER/Downloads/545-Article Text-4056-1-10-20230301 \(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/545-Article Text-4056-1-10-20230301 (2).pdf).
- Juhad, H. Moh. Juhad. "Analisis Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Selong Lombok Timur." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 1, no. 2 (2021): 1–7. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i2.106>.
- Kamilah, Fitri, Saeful Anwar, and Ratna Dewi. "Pengaruh Adanya Program Keluarga Harapan Bagi Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Program." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 4 (2023): 459–78. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i4.24294>.
- kementrian sosial. "Petunjuk Teknis Penyaluran Non-Tunai Program Keluarga Harapan," no. 28 (2020): 1–6. <https://drive.google.com/file/d/1c95fppRDYRtfnQhMI9TuKbcRf-jQcQk6/view>.
- Makhmucik, Hanjar, and Netty Endrwati. "Perlindungan Hukum Wanita Pekerja Seks (WPS) Pasca Penutupan Lokalisasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 42–54. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/918>.
- Masrul Ikhsan, Hafzana Bedasari, Ahmad Hadi. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya." *Jurnal Administrasi Publik Dan Sosial* 3, no. 3 (2022): 171–75. <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/view/89>.
- Meylina, Erytria, and Banu Witono. "Analisis Perbandingan KINERJA Keuangan Antara Bank BRI, BNI, BTN DAN MANDIRI Pada Tahun 2012-2020." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 165–71.
- Nandini, Riska, Bimby Gita Rama Putri, Syeikha Nabilla Setiawan, Fitriya Anggraeni, and Muhammad Fedryansyah. "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 74. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>.
- Nasution, Muhammad Irwan Padli. "Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis Mobile Learning Pada Sekolah Dasar." *Jurnal Iqra'* 10, no. 1 (2021): 5.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56683079/2376301PBIqra1libre.pdf?1527602526=&responsecontentdisposition=inline%3B+filename%3DSTRATEGI_PEMBELAJARAN_EFEKTIF_BERBASIS_M.pdf&Expires=1724581249&Signature=LcvV7vHgpi9XXJNfxXmHYza8VjmS5j~jlJuroSyn5co7p8kxKR.

Nurhasanah, Putri, Yudianto Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, and Sarwo Edy. “Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4589. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>.

Putra Nayotama, Taufiq Arya, and Ahmad Saifudin Mutaqi. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik* 2, no. 1 (2023): 113–21. <https://doi.org/10.55606/jurritek.v2i1.916>.

Putri, Amelia, and Eka Vidya Putra. “Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah.” *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2024): 131–40. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.880>.

Putri, Ummul Hanifah. “Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan,” 2021, 2. <https://osf.io/preprints/inarxiv/yg3an/>.

Rahmah, Syahidah. “Etos Kerja Pedagang Muslim Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.” *Journal of Applied Managerial Accounting* 5, no. 2 (2021): 78–94. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i2.3496>.

Refalgi Albar, Syamsudin. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kelurahan Delapan Ilir Kota Palembang).” *Jurnal EnersiaPublika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik* 8, no. 1 (2024): 64. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/1902.

Rismana, Daud. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh).” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 137. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2201>.

Rizayani, Siti, Syaharuddin Syaharuddin, Muhammad Rezky Noor Handy, Ersis Warmansyah Abbas, and Jumriani Jumriani. “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kota Banjarbaru.” *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 1 (2022): 74–82. <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5209>.

- Robert B. Dugan Steven J Taylor. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Rohman,; Abd, Retno Ayu, and Dewi Novitawati. "Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 8, no. 2 (2020): 22.
- Sapsudin, Asep. *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024.
- Sari, Yulia Adella. "Pengaruh Kemiskinan Pengangguran Indeks Pembangunan Manusia Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 1–10. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/785/481>.
- Sayyidah, Aisya Farah, Rifda Nafisa Mardhotillah, Nur Alfiana Sabila, and Sri Rejeki. "Peran Religiusitas Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis." *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam* 13, no. 2 (2022): 103–15. <https://doi.org/10.15548/alqalb.v13i2.4274>.
- Senduk, Nikita Vidiana, Burhanuddin Kiyai, and Novva N. Plangiten. "Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado." *Jap* 7, no. 101 (2021): 40–47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33294/31487>.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Sinurat, Ronaldo Putra Pratama. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Registratie* 5, no. 2 (2023): 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>.
- Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 1–13. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/180>.
- Sugiarto, Dergibson Siagian dan. *Metode Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Quran and Hadits* 3, no. 1 (2020): 2. file:///C:/Users/USER/Downloads/15-Article Text-145-1-10-20201001.pdf.
- Sulfadli, Sulfadli, Gita Susanti, Muh. Tang Abdullah, and Rizal Pauzi. “Evaluasi Dampak Program: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Enrekang.” *Development Policy and Management Review (DPMR)* 3, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v3i1.26674>.
- Sunaryo. *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sunusi, Dewi Kurniawati, Anderson Kumenaung, and Debby Rotinsulu. “Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 14, no. 2 (2014): 120–37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4732>.
- Suwandewi, A A I, and D Rahmadanik. “Program Keluarga Harapan Menangani Kemiskinan Di Kelurahan Klampis Ngasem.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* ... 10, no. 1 (2024): 1–11. <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/12696>.
- Syahdillah, Alfi, and Eddy Suriyani. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Bidang Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.” *Japb* 6, no. 1 (2023): 92–102. <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/740/596>.
- Syahrin, Muhammad Alfi, Mohammad Arifin, and Reza Hilmy Luayyin. “Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1, no. 2 (2022): 95–105. <https://doi.org/10.46773/.v1i2.395>.
- Syahrurn, Salim dan. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, Dan Pendidikan*. 2007th ed. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Tamuntuan, Cindie Gita D., Stefanus Sampe, and Fanley N. Pangenaman. “Transparansi Pendataan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

- (PKH) Di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.” *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47384/42154>.
- Timmerman, Martha Inka, Sarah Sambiran, and Sofia E Pangemanan. “Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Mahakeret Barat.” *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34570/32454>.
- Utami, N D, R Nurfalah, and ... “Analisis Adanya Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2021.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis ...* 1, no. 3 (2022): 162–75. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/74%0Ahttps://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/download/74/62>.
- Wahyu Suprianoor, Usamah Hanafie, Masyhudah Rosni. “The Welfare of Rubber Farmer Family in Vilage 7 Wonorejo, Kusan Hulu District, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province.” *Tugas Akhir Mahasiswa* 5, no. 1 (2021): 206–13. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/fag>.
- Wibowo, Wahyu. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Bogor: Mardi Yuana, 2011.
- Winne Ayunda Gaiska, Naufal Gama Affandyar, and Muhammad Yasin. “Analisis Penyebab, Konsekuensi, Dan Solusi Potret Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto Pasca Reformasi.” *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 2 (2023): 141–49. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i2.386>.
- Wulandari, Indria Wahyuni dan Sri Pingit. “Pemetaan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Menggunakan Analisis Cluster Hierarki.” *Jurnal Sains Dan Seni* 11, no. 1 (2022): 1–6. <https://www.neliti.com/publications/488166/pemetaan-kabupatenkota-di-jawa-timur-berdasarkan-indikator-kesejahteraan-rakyat>.
- Yasin, Roqi, and Muhammad Rizqie Aris. “Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 11 (2023): 1112–21. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i11.1853>.
- Zunaidi, A., V. A., Humaira, N., Nabil, G., Saputra, I., Ismail, and M. Murliati. “Manajemen Zakat Dan Waqaf” 3, no. 2 (2023): 40–44. [https://repository.iainkediri.ac.id/1034/1/Manajemen Ziswaf 2023.pdf](https://repository.iainkediri.ac.id/1034/1/Manajemen%20Ziswaf%202023.pdf).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Pendamping PKH

A. Kebijakan PKH

1. Apakah ada kebijakan baru terkait PKH tahun ini? Jika Iya bagaimana pendamping memastikan kebijakan baru tersosialisasikan dengan baik kepada penerima manfaat?
2. Apakah kebijakan PKH mampu mendorong untuk meningkatkan kesejahteraan di kelurahan pontap?
3. Apakah kebijakan dari program PKH dapat mengatasi kemiskinan di Kelurahan Pontap?

B. Tepat Sasaran

1. Apakah Ibu melakukan verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) secara rutin dan bagaimana anda memastikan bahwa data yang digunakan akurat?
2. Langkah apa yang diambil untuk memastikan bahwa KPM yang terdaftar memang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam program PKH?
3. Bagaimana Ibu menangani temuan atau keluhan dari masyarakat terkait keluarga yang tidak seharusnya menerima bantuan atau keluarga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar?
4. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa keluarga yang menjadi penerima manfaat benar-benar menggunakan bantuan PKH sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (misalnya untuk pendidikan atau kesehatan)?

C. Transparansi

1. Bagaimana Ibu memastikan bahwa proses seleksi dan penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dilakukan secara terbuka dan transparan?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusi bantuan PKH?
3. Sejauh mana Anda melibatkan pihak-pihak lain, seperti pemerintah desa atau tokoh masyarakat, dalam proses pemutakhiran data KPM agar lebih transparan?

D. Efektivitas Penyaluran Dana

1. Bagaimana Ibu memastikan bahwa penyaluran dana PKH tepat waktu kepada keluarga penerima manfaat (KPM)? Apakah ada kendala yang sering terjadi dalam proses penyaluran?
2. Apakah ada mekanisme monitoring atau pelaporan yang digunakan untuk memastikan bahwa dana yang diterima KPM digunakan untuk kebutuhan yang sesuai dengan tujuan program?
3. Bagaimana Ibu menangani masalah yang timbul jika ada KPM yang tidak dapat mengakses atau mengambil dana PKH dengan lancar (misalnya karena masalah administrasi, lokasi, atau kendala teknis lainnya)?

E. Penggunaan Dana

1. Apa yang dilakukan jika ditemukan adanya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan dana oleh penerima manfaat?
2. Bagaimana Ibu memastikan bahwa dana yang diterima oleh KPM digunakan dengan efektif?

3. Apa yang Ibu lakukan agar dana yang di dapatkan KPM dapat meningkatkan terutama dibidang ekonomi?

Wawancara Kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH

A. Kebijakan PKH

1. Apakah dengan kebijakan PKH Ibu sebagai KPM bisa dengan mudah mengakses seperti program kesehatan dan pendidikan?
2. Apakah dengan kebijakan PKH membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Ibu?
3. Apakah kebijakan PKH dapat meningkatkan perekonomian keluarga Ibu?

B. Tepat Sasaran

1. Sebelum Ibu mendapatkan bantuan PKH apakah petugas PKH pernah melakukan survei atau kunjungan ke rumah Ibu?
2. Bagaimana Caranya Ibu bisa terdaptar sebagai penerima PKH?

C. Transparansi

1. Apakah ibu diberitahukan oleh petugas PKH terkait mekanisme pendaftaran calon penerima PKH?
2. Apakah Ibu pernah mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan? Jika iya, apakah alasannya dijelaskan dengan transparan?
3. Apakah Ibu sebagai KPM PKH diminta untuk melaporkan penggunaan bantuan secara rutin?

D. Efektivitas Penyaluran Dana

1. Apakah program PKH membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga Ibu?
2. Apakah ada perubahan dalam akses pendidikan atau kesehatan anak-anak Ibu setelah menerima PKH?
3. Apakah pencairan dana PKH selalu sesuai dengan jadwal yang ditentukan?
4. Dalam proses pencairan dana PKH apakah mudah dilakukan?

E. Penggunaan Dana

1. Apakah dana yang ibu terima sebagai KPM PKH mencukupi untuk kebutuhan keluarga Ibu?
2. Dana yang Ibu terima digunakan untuk apa saja?
3. Apakah bantuan ini sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak Ibu?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara Bapak Abdullah
(Lurah Pontap)

Wawancara Ibu Sukmawati
(Penerima PKH)

Wawancara Ibu Iramaya
(Penerima PKH)

Wawancara Ibu Rahmawati
(Penerima PKH)

Wawancara Ibu Adelia
(Penerima PKH)

Wawancara Ibu Adriana
(Penerima PKH)

Wawancara Ibu Dhita
(Penerima PKH)

Wawancara Ibu Erliana
(Penerima PKH)

Wawancara Ibu Veronika
(Pendamping PKH)

Wawancara Ibu Maya
(Penerima PKH)

Wawancara Ibu Sarah
(Penerima PKH)

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Tokasirang, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Web site: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : B 543/In.19/FEBI/HM.01/12/2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Palopo, 27 Desember 2024

Yth. Kepala DPMPTSP Kota Palopo
Di Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Nama : Arkas Maulana Asri
NIM : 2104010056
Program Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2024/2025

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi Palopo dengan judul: **"Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo"**. Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikurn Wr. Wb.

Dekan,
Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

RIWAYAT HIDUP

Arkas Maulana Asri, lahir di Palopo pada tanggal 03 November 2002. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Asri Mude dan ibu Nurhaedah DM. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 13 Tappong. Kemudian, Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Palopo, Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo dan selesai pada tahun 2021. penulis melanjutkan pendidikan S1 pada tahun 2021 di program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul Skripsi: “ *Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*”. Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diimpikan, Aamiin. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya-sungguhnya sesuai dengan perjalanan hidup penulis.